

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP BELANJA DAERAH
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2005-2009**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Deni Bramantyo Nugroho Putro

No Mahasiswa : 07312204

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP BELANJA DAERAH
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2005-2009**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Deni Bramantyo Nugroho Putro

No Mahasiswa : 07312204

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN
PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP BELANJA DAERAH
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2005-2009**

Hasil Penelitian

Diajukan oleh

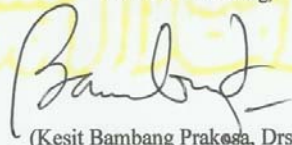
Nama : Deni Bramantyo Nugroho Putro

No. Mahasiswa : 07312204

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal, 24 Januari 2012

Dosen Pembimbing,



(Kesit Bambang Prakosa, Drs., Msi)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 24 Januari 2012

Penyusun,



(Deni Bramantyo Nugroho Putro)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**SKRIPSI BERJUDUL**

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan
Pendapatan Per Kapita Terhadap Belanja Daerah Tahun 2005-2009

Disusun Oleh: DENI BRAMANTYA NUGROHO PUTRO
Nomor Mahasiswa: 07312204

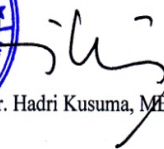
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 14 Februari 2012

Penguji/Pemb. Skripsi : Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si
Penguji I : Rifqi Muhammad, SE, M.Sc, SAS



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA



PERSEMBAHAN



Kupersembahkan karya ini untuk

Ayah dan Ibu serta Sahabat,

Terimakasih atas dukungan dan

bantuannya selama ini

MOTTO

”...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”

(Ar-Ra’ad : 11)

”Jangan biarkan kemalasan mengisi waktu kita yang berharga”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur dan terimakasih sebesar-besarnya terucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan cinta, kasih, dan sayang-Nya. Salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi inspirasi dan suri tauladan kami, seluruh umat Islam di dunia ini.

Penulis sangat bersyukur setelah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Perkapita Terhadap Belanja Daerah di Provinsi DIY”. Skripsi ini ditulis dalam upaya melengkapi syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1.

Sebelumnya, penulis mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan yang dilakukan penulis, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Melalui tulisan sederhana ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.DR. Edy Suandi Hamid, M.Ec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof.Dr. Hadri Kusuma, MBA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Noor Endah Cahyawati Dra.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang dengan sabar membimbing, memberi masukan, dan bersedia berbagi ilmu dengan penulis sehingga mendapatkan berbagai macam ilmu yang kelak akan sangat bermanfaat.

5. Seluruh dosen pengajar, staf, serta karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia atas pengabdianya pada fakultas tercinta.
6. Kedua orangtuaku, Bapak Dr. Setyo Nugroho (alm) dan Dra. Isti Widayati , terimakasih atas cinta dan kasih sayang serta motivasinya kepada penulis untuk menjalani hidup ini.
7. Kakakku, Andrianto Nugroho Putro, S.H, M.Ec.Dev dan Yulli Fitriyanna HS, terimakasih bantuannya dalam penyusunan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Keponakan tersayang, Rasya Ardian Nugroho, yang selalu bisa menghiburku saat sedang lelah.
9. Saudara sepupuku yang baik hati, Mada, Hendi, Afif, Tika, Fandi, Agus, Sulis, Novi, Afin.
10. Bapak ibu staf dan karyawan perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY.
11. Teman-teman KKN unit 25: Haryo, Surya, Mas Adit, Gladia, Obo, Desvi dan Erlina, terimakasih atas bantuan yang telah diberikan.
12. Sahabat jauhku yang berada di Kulonprogo, Tika, Gendro, Gepeng, Mas Nur, Fajar, Resti, Agil, Lia, dan anggota FORKAMMI yang lain.
13. Eryusya Danang Ramadhan, Agus Susilo, Abi Suryono, sahabat terbaikku yang selalu memberikan motivasi kepada penulis selama ini.
14. Teman-teman seperjuangan badminton dikala susah, Reza, Putra, Fatur, dkk.
15. Kawan-kawanku yang tergabung dalam PB. K.COST: Azizi, Huda, Hendra, Adi, Pak Mur, Danang, Gusti, dll, yang menjadi tempat mengasah bakat alam sekaligus pengisi waktu luang penulis.
16. UKM Badminton FE UII, yang menjadi tempat latihan bulutangkis setiap hari sabtu sore.

17. Bapak-bapak PB.ISSAGAM (SMA ISLAM 1 GAMPING), Pak Edi, Pak Mardi, Pak Sapto,Pak Istriyanto.
18. Semua pihak yang selalu berdoa untuk keberhasilan penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan.



Yogyakarta, Januari 2012

Deni Bramantyo N.P

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iv
Persembahan.....	v
Motto.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
Abstraksi.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6

1.5 Batasan Masalah.....	7
1.6 SistematikaPenulisan.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pendapatan Asli Daerah.....	9
2.2 Dana Alokasi Umum.....	13
2.3 Pendapatan Perkapita.....	16
2.4 Belanja Daerah.....	19
2.5 Penelitian Terdahulu.....	26
2.6 Hipotesis Penelitian.....	27
2.7 Model Penelitian.....	30
2.8 Signifikansi Penelitian.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel.....	32
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.3 Variabel yang Digunakan.....	33
3.3.1 Variabel Dependen.....	33
3.3.2 Variabel Independen.....	33
3.3.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	33

3.3.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU).....	33
3.3.2.3 Pendapatan Perkapita (PKt).....	34
3.4 Metode Analisis Data.....	34
3.4.1 Statistik Deskriptif.....	34
3.4.2 Pengujian Asumsi Klasik.....	34
3.4.3 Analisis Uji Regresi Sederhana.....	37
3.4.4 Analisis Uji Regresi Berganda.....	37
BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN	
4.1 Analisis Deskriptif.....	39
4.2 Analisis Statistik.....	44
4.2.1. Asumsi Klasik.....	45
a. Uji Normalitas.....	45
b. Uji Multikolinieritas.....	46
c. Uji Autokorelasi.....	47
d. Uji Heterokedastisitas.....	48
e. Uji Lineritas.....	49
4.2.2. Analisis Uji Regresi Sederhana.....	50
4.2.3. Analisis Uji Regresi Berganda.....	52
4.3 Pengujian Hipotesis.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	59

5.2 Implikasi.....	60
5.3 Keterbatasan Penelitian	60
5.4 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	65



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi PAD Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2007-2008.....	13
Tabel 1.2 Realisasi DAU Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2007-2008.....	16
Tabel 1.3 Perbandingan Pendapatan perkapita Beberapa Negara	17
Tabel 1.4 Realisasi Pendapatan perkapita di DIY Tahun 2005-2009.....	19
Tabel 1.5 Pemetaan Struktur Belanja Daerah.....	23
Tabel 1.6 Realisasi Belanja Daerah di DIY Tahun 2005-2009.....	26
Tabel 4.1 Hasil Deskriptif DAU.....	40
Tabel 4.2 Hasil Deskriptif PAD.....	41
Tabel 4.3 Hasil Deskriptif PKt.....	42
Tabel 4.4 Hasil Deskriptif Belanja Daerah.....	43
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	47
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi.....	48
Tabel 4.7 Hasil Uji Linearitas.....	50
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana.....	51
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	52
Tabel 4.10 Hasil Koefisien Determinasi.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Provinsi DIY Tahun 2005.....	66
Lampiran 2 Realisasi Pendapatan dan Belanja Provinsi DIY Tahun 2006.....	76
Lampiran 3 Realisasi Pendapatan dan Belanja Provinsi DIY Tahun 2007.....	86
Lampiran 4 Realisasi Pendapatan dan Belanja Provinsi DIY Tahun 2008.....	96
Lampiran 5 Realisasi Pendapatan dan Belanja Provinsi DIY Tahun 2009.....	106
Lampiran 6 PDRB per Kapita Provinsi DIY Tahun 2005-2009.....	115
Lampiran 7 Daftar Hasil Pengujian.....	118



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan Pendapatan perkapita (PKt) terhadap belanja daerah di DIY. Sampel yang digunakan adalah realisasi anggaran dan belanja daerah kabupaten/kota di DIY tahun 2005-2009. Alat yang digunakan adalah regresi sederhana dan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah tetapi PKt tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak merata.

Kata kunci : *Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan perkapita (PKt), Belanja Daerah (BD)*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Keanekaragaman wilayah dan jumlah penduduk di Indonesia yang sangat besar menimbulkan dampak perbedaan kesejahteraan antardaerah yang berbeda pula. Salah satu penyebab adalah penerapan sistem sentralistik di masa lalu yang hampir mencakup segala bidang. Seperti dalam bidang perpajakan, sumber daya alam baik pengelolaannya maupun hasil SDA, perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah, telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan dalih untuk meningkatkan pembangunan di daerah, pemerintah mengambil sebagian besar dari hasil pendapatan, baik pendapatan dari pajak-pajak yang diberlakukan pada perusahaan maupun pendapatan dari hasil sumber daya alam yang ada di daerah-daerah. Dari dana tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran ke daerah-daerah melalui program pembangunan dan rencana serta pelaksanaannya diatur sepenuhnya oleh pusat (*Mubyarto dan Daniel W.Bromley, 2002*). Seringkali pemerintah pusat memberikan penjelasan kalau upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah dan mendorong peningkatan kemampuan keuangan daerah, tetapi kenyataannya keinginan pemerintah pusat tersebut tidak dapat terealisasi. Perbedaan pembangunan antarpulau

Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua sangatlah berbeda karena pemerintah pusat lebih menekankan pada pulau Jawa dan terbukti dari sebaran investasi, pendapatan masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih dominan di Jawa daripada wilayah lain (*Sondakh, 1999 dan Kuncoro, 2000*).

Dengan diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 mengenai *Pemerintahan Daerah* dan UU No. 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, membawa “angin segar” terhadap daerah karena daerah sekarang dihadapkan untuk mendapatkan potensi lokal dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangan serta mewujudkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Adanya otonomi daerah tentunya sangatlah membantu perubahan yang terjadi dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik. Otonomi daerah adalah kemampuan mengurus dirinya sendiri yang berkaitan dengan pemerintahan umum maupun pembangunan, yang sebelumnya diurus pemerintah pusat. Selain memerlukan kemampuan keuangan, juga diperlukan sumber daya manusia yang terdidik dan berkualitas, sumber daya alam, modal dan teknologi (Rudini, 1994 dalam Silalahi, *et al*, 1995).

Menurut Mardiasmo (2002), tujuan utama otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik (*publik service*) dan memajukan perekonomian daerah. Terdapat dua hal dalam rangka pemberian kebijakan otonomi daerah. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan

jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyambut era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Secara umum pertumbuhan ekonomi sering diukur menggunakan produk domestik bruto (PDB). Perhitungan ini tidaklah selalu benar disebabkan tidak sesuai dengan arti pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Pendapatan perkapita dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dikarenakan pendapatan perkapita lebih menekankan pada kemampuan suatu negara/daerah untuk meningkatkan PDB/PDRB untuk melebihi tingkat pertumbuhan penduduk (Kuncoro, 2004 dan Gaspersz&Feonay, 2003).

Dengan terlaksanakannya program otonomi daerah, tidak serta merta daerah “diwajibkan” mengurus segala keperluannya termasuk masalah keuangan tapi pemerintah tetap memberikan dana bantuan berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terjadi karena ketidaksepahman diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap besarnya anggaran yang akan diberikan. Pemerintah berpedoman pada Penjelasan UU Nomor 25/1999 mengenai pengalokasian dana perimbangan termasuk dana alokasi umum, memiliki tiga tujuan. Pertama, memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Kedua, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang

adil, proporsional, rational, transparan, partisipasif, bertanggungjawab (akuntabel), dan pasti. Ketiga, mewujudkan sistem peimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mencerminkan pembagian kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan mengurangi kesenjangan antardaerah dalam kemampuannya untuk memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari daerah yang bersangkutan.

Pemerintah daerah beranggapan anggaran yang diterima daerahnya tidak sesuai dengan anggaran yang diterima daerah lain, dengan alasan mempercepat proses pembangunan, pemerintah daerah menuntut pemerintah pusat agar “adil” dalam memberikan anggaran sehingga tidak terjadi “kecemburuan” antardaerah.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan kemandirian, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik, melakukan pembenahan dan perbaikan di segala sector yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercemin dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah (Mardiasmo,2002).

Pada penelitian terdahulu seperti Darwanto dan Yustikasari (2007), Adi (2006), mendapatkan kesimpulan yaitu pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi yang diukur menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada penelitian yang akan dilakukan ini menekankan pada Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pendapatan perkapita (PKt).

Dengan kondisi tersebut, penulis berminat untuk menulis skripsi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Perkapita terhadap Belanja Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2009”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap realisasi belanja daerah
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap realisasi belanja daerah

3. Apakah Pendapatan perkapita (PKt) berpengaruh positif terhadap realisasi belanja daerah

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah pendapatan perkapita mempengaruhi realisasi belanja daerah
- b. Untuk mengetahui apakah dana alokasi umum mempengaruhi realisasi belanja daerah
- c. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah mempengaruhi realisasi belanja daerah

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dari APBN dan APBD.

2. Bagi Dunia Pendidikan

Memberikan kontribusi teori sebagai bahan referensi sekaligus data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang ini.

1.4. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah pengaruh PAD, DAU dan Pendapatan perkapita Terhadap belanja daerah di Provinsi DIY selama 2005-2009.

1.5. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Berisi tentang penjabaran teori yang melandasi penelitian antara lain teori dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, pendapatan perkapita dan belanja daerah maupun hasil dari penelitian terdahulu yang berfokus pada pengaruh PAD, DAU, PKt terhadap belanja daerah, serta uraian hipotesis penelitian.

Bab III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang populasi dan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan metode analisis data dan prosedur pengujian hipotesis.

Bab IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang uraian secara terperinci mengenai langkah-langkah analisis data yang mencakup analisis deskriptif, pengujian asumsi klasik, analisis

uji regresi linier sederhana, analisis uji regresi berganda, dan hasilnya serta pembahasan hasil yang diperoleh.

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi ulasan secara singkat mengenai hasil pembahasan, saran dan keterbatasan penelitian untuk implikasi penelitian di masa yang akan datang.



BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dibahas secara lebih rinci mengenai teori dan pendekatan yang dapat menjelaskan mengenai arti dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan perkapita (PKt), dan Belanja Daerah (BD). Serta teori yang menjelaskan hubungan dari keempat variabel berupa penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dan sebagai acuan dalam pemecahan masalah yang sedang diteliti.

2.1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, telah disebutkan pengukuran kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari besaran pendapatan asli daerah yang diperoleh. Sebab, salah satu tujuan utama desentralisasi adalah menciptakan kemandirian daerah, dalam hal ini pemerintah daerah (pemda) harus mampu menggali potensi-potensi sumber keuangan local, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002).

Terjadinya peningkatan PAD merupakan dampak dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi positif, mempunyai kemungkinan dalam meningkatkan PAD yang akan diterima (Adi, 2006). Pemda selaku

yang berwenang didalamnya, hendaknya berusaha meningkatkan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki daerahnya.

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2002). Terdapat empat jenis pendapatan:

1. Pajak daerah

Merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya untuk Publik Investment (Kaho, 1988). Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi, terdapat pembedan pendapatan pajak antara provinsi dengan kota/kabupaten. Berikut adalah jenis pendapatan pajak untuk provinsi:

- Pajak kendaraan bermotor
- Bea balik nama kendaraan bermotor
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- Pajak kendaraan di atas air
- Pajak air di bawah tanah
- Pajak air permukaan

Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- Pajak hotel
- Pajak restoran
- Pajak hiburan

- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan
- Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- Pajak parkir

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sesuai dengan UU No 34 Tahun 2000 mengenai Pajak daerah dan Retribusi Daerah dapat dipisahkan menjadi:

- a. Retribusi provinsi, terdiri atas:
 - retribusi pelayanan kesehatan
 - retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - retribusi penggantian biaya cetak peta
 - retribusi pengujian kapal perikanan
- b. Retribusi kabupaten/kota terdiri atas:
 - Retribusi pelayanan kesehatan
 - Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 - Retribusi penggantian biaya cetak KTP
 - Retribusi biaya cetak akta catatan sipil
 - Retribusi pelayanan pemakaman
 - Retribusi pelayanan pengabuan mayat
 - Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

- Retribusi pelayanan pasar
 - Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - Retribusi pengujian kapal perikanan
 - Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
 - Retribusi jasa usaha terminal
 - Retribusi tempat khusus parkir, dll.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini terdiri dari:
- Bagian laba perusahaan milik daerah.
 - Bagian laba lembaga keuangan bank.
 - Bagian laba lembaga keuangan non bank.
 - Bagian laba atas pernyataan modal/investasi.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- Objek pendapatan jenis ini adalah:
- Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
 - Penerimaan jasa giro.
 - Penerimaan bunga deposito.
 - Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
 - Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

Di Provinsi DIY, sektor pendapatan asli daerah dari tahun 2005 sampai 2009 mengalami peningkatan tiap-tiap kabupaten. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah berupaya meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki setiap daerah,

seperti kabupaten Bantul dan Gunung Kidul, pendapatan daerah terbesar disumbangkan dari sektor retribusi dan retribusi ini berasal dari hasil pemasukan obyek-obyek wisata seperti pantai.

Tabel 1.1
Realisasi PAD Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2006-2007 (000)

Kota/Kabupaten	2006	2007
Kota Yogyakarta	96.419.456	114.098.351
Sleman	90.710.095	120.656.549
Bantul	44.005.311	57.229.727
Kulonprogo	35.203.275	38.882.765
Gunung Kidul	29.801.036	28.878.356

Sumber: BPS (dalam juta)

Pada tahun 2006-2007, kota Yogyakarta memberikan pendapatan terbesar dari pada kabupaten lainnya. Sebagian besar pendapatan diperoleh dari sektor pajak dikarenakan, secara ekonomi Kota dan Sleman merupakan pusat perdagangan Yogyakarta sehingga pendapatan uang diterima juga lebih besar dibandingkan tiga kabupaten lainnya yang sebagian besar mendapat pemasukan dari sektor retribusi.

2.2 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta PP No.55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dijelaskan penggunaan, tatacara pemakaian dana dari pemerintah

pusat, didalamnya termasuk Dana Alokasi Umum karena Dana Perimbangan terdiri atas tiga komponen yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan asas desentralisasi (Halim, 2004). Dana alokasi umum bersifat “*block grant*” yang artinya penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Bastian (2003), dana alokasi umum adalah dana perimbangan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah. Fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. DAU suatu daerah ditentukan besarnya *fiskal gap* daerah tersebut, yang merupakan selisih kebutuhan daerah (*fiskal need*) dan potensi daerah (*fiskal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh pembagian DAU yang kecil tetapi bagi daerah yang potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar, mendapatkan alokasi DAU yang relatif besar.

Cara menghitung dana alokasi umum sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas
3. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk seluruh daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
4. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Pemberian transfer ke daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan vertikal antara pusat dan daerah, mengatasi persoalan efek layanan publik antar daerah dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah.

Pasca terjadinya bencana gempa yang melanda DIY, terdapat dua kabupaten yang menerima dana alokasi umum (DAU) yang lebih besar dari daerah lain yaitu Sleman dan Bantul. Hal ini disebabkan setelah terjadinya gempa, berbagai infrastruktur di dua kabupaten tersebut sebagian besar hancur dan tidak bisa digunakan. Sehingga pemerintah mengalokasikan dana yang lebih kepada daerah yang infrastrukturnya paling parah agar pemulihan kehidupan masyarakat dan perekonomian cepat berkembang lagi.

Tabel 1.2
Realisasi DAU Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2007-2008 (000)

Kota/Kabupaten	2007	2008
Kota Yogyakarta	365.042.000	411.257.232
Sleman	543.065.000	592.594.528
Bantul	524.293.000	583.169.351
Kulonprogo	378.145.130	403.656.783
Gunung Kidul	459.851.000	504.395.748

Sumber: BPS (diolah)

2.3. Pendapatan Perkapita

Prestasi ekonomi suatu bangsa atau negara dapat diniai dengan berbagai ukuran. Secara umum prestasi tersebut diukur melalui pendapatan nasional. Walaupun tidak hanya pendapatan nasional sebagai alat ukur prestasi bangsa tapi pendapatan nasional cukup representatif dan lazim digunakan karena bukan hanya mengukur perkembangan ekonomi suatu negara tetapi dapat membandingkan perekonomian antar negara.

Pada tahun 2009, pendapatan perkapita masyarakat Indonesia sekitar \$2.272. Dengan pendapatan perkapita \$2.272, Indonesia masuk peringkat kelima pada negara-negara ASEAN setelah Singapore, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. (World Bank Report, 2005-2009).

Tabel 1.3
Perbandingan Pendapatan perkapita Beberapa Negara (\$)

Country Name	2005	2006	2007	2008	2009
Indonesia	1,258	1,586	1,859	2,172	2,272
Brunei Darussalam	26,248	30,975	32,443	37,414	27,390
Cambodia	471	538	632	749	744
Lao PDR	472	597	718	910	966
Malaysia	5,286	5,890	6,905	8,099	6,902
Myanmar
Philippines	1,205	1,403	1,685	1,925	1,836
Singapore	28,953	31,519	36,655	36,738	37,790
Thailand	2,644	3,078	3,643	3,993	3,835
Vietnam	642	731	843	1,070	1,130

Sumber: World Bank

Disamping itu, secara tidak langsung pembangunan ekonomi turut merubah kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat tradisional seperti misalnya masyarakat menjadi bersifat lebih individualistis, hubungan antara anggota masyarakat menjadi lebih formal, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dengan bertambah tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat, biasanya diikuti oleh pengorbanan moril dan usaha lebih banyak oleh masyarakat tersebut (Arsyad,2004). Disatu pihak pembangunan ekonoi akan mempertinggi kesejahteraan masyarakat tetapi dilain pihak tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi harus dicapai dengan beberapa pengorbanan dalam perilaku hidup di masyarakat.

“ *like everything else, economic growth has its costs*”, bahwa pembangunan ekonomi disamping memberi manfaat kepada masyarakat juga membutuhkan pengorbanan (Lewis dalam Arsyad, 2004)

Salah satu persyaratan yang mendasar dalam pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk karena secara tidak langsung pembangunan oleh pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Peningkatan terhadap pelayanan publik turut serta dalam meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah yang meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana penunjang lainnya.

Jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Saragih, 2003).

Dalam lima tahun terakhir, pendapatan yang diterima masyarakat di DIY semakin meningkat yang membawa dampak meningkatnya juga pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota.

Tabel 1.4**Realisasi Pendapatan perkapita Kabupaten/Kota di DIY 2005-2009**

Kota/Kabupaten	2005	2006	2007	2008	2009
Kota Yogyakarta	10,104,516	10,319,070	10,587,919	10,989,241	11,336,224
Sleman	5,082,668	5,240,006	5,408,803	5,612,511	5,789,440
Bantul	3,712,307	3,732,268	3,845,008	3,976,712	4,097,212
Kulonprogo	3,920,799	4,075,587	4,239,954	4,435,553	4,609,781
Gunung Kidul	4,000,253	4,141,652	4,292,535	4,470,621	4,649,134

Sumber: Diolah dari BPS

Hal ini terjadi karena terdapat dua teori yang mempengaruhi. Pertama, teori kutub pertumbuhan (*growth pole theory*), adanya konsentrasi pertumbuhan daerah dipusat yang tidak selalu berdampak positif bagi daerah pinggiran. Dapat dikatakan kutub pertumbuhan di provinsi DIY adalah Kota Yogyakarta. Kedua, teori aglomerasi ekonomi yang menjelaskan peranan *urbanization economies* dan *localization economies*. “Penghematan urbanisasi” terjadi karena orang dan investor lebih suka memilih daerah perkotaan yang menawarkan penghematan biaya akibat kemudahan aksesibilitas dan keberadaan infrastruktur kota. “Penghematan lokalisasi” muncul karena kedekatan geografis terhadap sumber bahan baku dan tenaga kerja (Kuncoro,2004).

2.4. Belanja Daerah

Dalam menerapkan pembangunan daerah, harus berpedoman kepada perencanaan tingkat nasional karena didalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional merupakan suatu kesatuan. Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, pembangunan diprioritaskan dalam lima hal yaitu, *Pertama*, pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial; *Kedua*, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia; *Ketiga*, pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional; *Keempat*, penguatan perekonomian domestik yang berdaya saing yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi; *Kelima*, peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.

2.4.1. Klasifikasi Belanja Daerah

2.4.1.1. Perbedaan Klasifikasi Belanja Daerah Berdasarkan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 Dengan PP No.24 Tahun 2005

Sesuai Kepmendagri No.29 Tahun 2002, awalnya belanja daerah dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian belanja aparatur daerah dan bagian belanja pelayanan publik. Dari kedua bagian belanja tersebut diklasifikasikan lebih rinci lagi yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal. Dari setiap rincian tersebut diperinci lagi berdasarkan klasifikasi jenis belanja sebelumnya. Tetapi didalam standar akuntansi pemerintahan, tidak ada pos belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik serta tidak mengenal belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan sehingga lebih sederhana.

A. Belanja Administrasi Umum

Belanja administrasi umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas pelayanan publik. Belanja administrasi terdiri atas lima bagian:

- Belanja pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Bunga
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Pemeliharaan

B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan

Belanja operasi dan pemeliharaan adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas pelayanan publik. Belanja operasi dan pemeliharaan terdiri atas empat bagian:

- Belanja pegawai
- Belanja barang dan jasa
- Belanja perjalanan dinas
- Belanja pemeliharaan

C. Belanja Modal

Belanja modal adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan

menambah aset dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin.

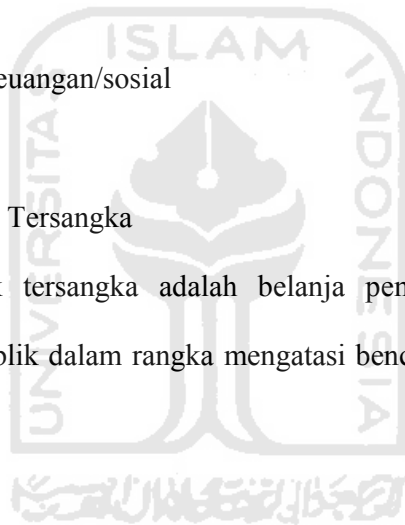
D. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan adalah kegiatan pengalihan uang atau barang dari pemerintah daerah. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan terdiri dari empat bagian:

- Bagi hasil
- Subsidi
- Bantuan keuangan/sosial
- Hibah

E. Belanja Tidak Tersangka

Belanja tidak tersangka adalah belanja pemerintah daerah untuk pelayanan publik dalam rangka mengatasi bencana alam atau bencana sosial.



Tabel 1.5
Pemetaan struktur Belanja Daerah

Keppmendagri No.29 Tahun 2002	PP No.24 Tahun 2005 (SAP)
A. Belanja Admistrasi Umum <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Pegawai • Belanja Barang dan Jasa • Bunga • Belanja Perjalanan Dinas • Belanja Pemeliharaan 	A. Belanja Operasi <ul style="list-style-type: none"> a.1. belanja pegawai a.2. belanja barang dan jasa <ul style="list-style-type: none"> • belanja barang habis pakai • belanja pemeliharaan • belanja perjalanan dinas a.3. bunga a.4. subsidi a.5. hibah a.6. bantuan keuangan/sosial a.7. bagi hasil
B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Pegawai • Belanja Barang dan Jasa • Belanja Perjalanan Dinas • Belanja Pemeliharaan 	B. Belanja Modal <ul style="list-style-type: none"> • belanja aset tetap • belanja aset lainnya
C. Belanja Modal <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Aset Tetap • Belanja Aset Lainnya 	C. Belanja Lain-lain/Tak Terduga
D. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> • Bagi hasil • Subsidi • Bantuan keuangan/sosial • Hibah 	
E. Belanja Tidak Tersangka	

(sumber: BPKT Depkeu)

2.4.1.2. Klasifikasi Belanja Menurut PP No.24 Tahun 2005

Secara umum terdapat dua tujuan dilakukannya pengklasifikasian belanja. Pertama, untuk kepentingan manajerial berguna untuk penyajian laporan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya dan sebagai akuntansi dan akuntansi anggaran. Kedua, untuk pertanggungjawaban, gunanya untuk membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dengan membandingkan

antara realisasi dengan anggaran tersebut. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan PP No.24 Tahun 2005, belanja dapat diklasifikasikan kedalam tiga klasifikasi lanjutan

A. Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Berikut adalah klasifikasi belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi:

- Belanja pegawai
- Belanja barang dan jasa
- Belanja bunga
- Belanja subsidi
- Belanja hibah
- Belanja bantuan keuangan/sosial
- Belanja bagi hasil
- Belanja modal
- Belanja lain-lain

B. Klasifikasi Organisasi

Klasifikasi organisasi adalah klasifikasi yang didasarkan pada unit organisasi pengguna anggaran.

C. Klasifikasi Fungsi

Klasifikasi berdasarkan fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening bendahara umum daerah. Apabila pengeluaran melalui bendahara, pengakuan terjadi pada saat terjadinya pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Pelaporan belanja pada laporan realisasi APBD menggunakan basis kas dan setiap belanja atau pengalokasian belanja harus berhubungan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat tercapai. Sedangkan kinerja Pemda dapat diukur melalui evaluasi pelaksanaan APBD.

Di provinsi DIY, anggaran belanja daerah pada tahun 2005-2008, pada semua daerah mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan pemerintah daerah ingin menaikkan potensi pendapatan yang dimiliki daerahnya dengan menaikkan belanja daerah dan diharapkan ekonomi semakin meningkat dan bertambahnya pendapatan masyarakat. Selain itu, pada tahun 2007-2008, dua kabupaten yaitu Sleman dan Bantul mengeluarkan anggaran belanja yang lebih besar dibandingkan tiga daerah lainnya. Ini dikarenakan pada 2006 Yogyakarta terkena gempa sehingga banyak infrastruktur yang tidak bisa digunakan sehingga Pemda setempat mengalokasikan anggaran yang besar agar kehidupan dan perekonomian segera pulih.

Tabel 1.6
Realisasi Belanja Daerah Provinsi DIY 2005-2009 (000)

Kota/Kabupaten	2005	2006	2007	2008	2009
Kota Yogyakarta	399,244,605	496,768,977	569,120,372	698,566,664	1,016,025,604
Sleman	508,279,544	609,765,409	752,113,976	906,618,990	1,016,025,604
Bantul	417,798,070	545,132,136	676,835,482	1,045,423,303	903,767,000
Kulonprogo	286,529,399	458,909,862	492,840,107	598,059,934	577,736,996
Gunung Kidul	352,144,433	503,624,606	575,683,751	717,302,227	694,407,909

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dilakukan Prakosa (2004) mengenai analisis dana alokasi umum (DAU), pendapatan asli daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah di Jawa Tengah dan DIY menunjukkan PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Santosa dan Rahayu (2005) tentang analisis pendapatan asli daerah (PAD) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Kediri, menyimpulkan bahwa ketiga variabel independen (pengeluaran pembangunan, penduduk, PDRB) sangat berpengaruh terhadap PAD terutama penduduk yang mempunyai pengaruh paling besar.

Pada penelitian berikutnya yang dilakukan Darwanto dan Yustikasari (2007) tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal,

menyimpulkan bahwa PAD dan DAU memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap variabel belanja modal. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi positif tapi tidak signifikan terhadap variabel belanja modal.

Dalam penelitian yang dilakukan Harianto dan Adi (2007) yang berjudul hubungan dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan perkapita menyimpulkan bahwa DAU sangat berpengaruh terhadap belanja modal, pendapatan perkapita berpengaruh dan negatif terhadap belanja modal, PAD sangat berpengaruh terhadap pendapatan perkapita, dan DAU berpengaruh terhadap PAD melalui belanja modal (efek tidak langsung).

2.6. Hipotesis Penelitian

2.6.1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Pembangunan infrastruktur daerah sangatlah berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat terutama dalam aktivitasnya. Semakin baik infrastruktur suatu daerah yang ditandai bertambahnya nilai belanja daerah, akan menarik pihak investor untuk berinvestasi di daerah tersebut sehingga pendapatan asli daerah akan bertambah (Abimanyu, 2005).

Beberapa penelitian sebelumnya seperti *Prakosa (2004); Harianto&Adi (2007), Adi (2006)*, menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja daerah. Menurut *Mardiasmo (2002)*, peningkatan pemerintah daerah dalam investasi modal diharapkan mampu meningkatkan

kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah.

Di era desentralisasi, pemerintah daerah lebih berfokus terhadap pembangunan daerah karena dengan meningkatnya pembangunan akan menaikkan potensi pendapatan daerah sehingga anggaran belanja yang akan dialokasikan untuk pembangunan selanjutnya akan meningkat.

Dengan konsep ini maka hipotesis untuk melihat pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah adalah:

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) t-1 berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD)t.

2.6.2. Hubungan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Diberikannya DAU kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat diharapkan dapat membantu pemerintah daerah setempat dalam masalah pembiayaan belanja daerah dan tidak serta merta pemerintah daerah hanya menggantungkan kebijakan belanja dengan mengandalkan DAU tetapi dituntut dengan mendapatkan pendapatan dari potensi-potensi yang dimiliki daerah tersebut dalam bentuk PAD. Dibeberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada PAD (*Sidik et al, 2002 dalam Harianto, 2007*).

Dengan demikian, dana alokasi umum (DAU), merupakan indikator dalam menentukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin besar DAU yang diterima maka daerah tersebut terlalu bergantung terhadap pemerintah pusat. Penelitian yang dilakukan Harianto dan Adi (2007), menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh Prakosa (2004), besarnya Belanja Daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima Pusat.

Dengan konsep ini maka hipotesis untuk melihat pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah adalah:

H2 : Dana Alokasi Umum (DAU)_{t-1} berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD)_t.

2.6.3. Hubungan Pendapatan Perkapita Terhadap Belanja Daerah

Pendapatan perkapita merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan *standar of living*. Negara yang memiliki pendapatan perkapita yang tinggi umumnya memiliki *standar of living* yang tinggi (Oktavia, 2005). Meningkatnya pendapatan perkapita merupakan efek dari keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

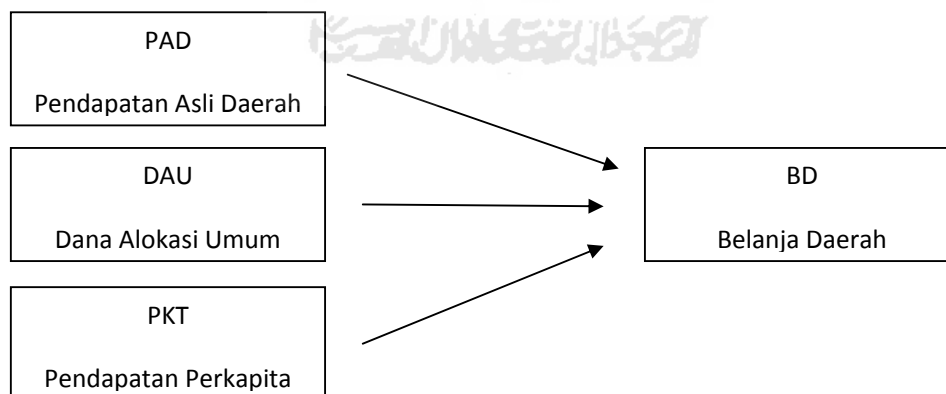
Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas

(Ismerdekaningsih&Rahayu, 2002). Penelitian yang dilakukan Saragih (2003), menyatakan jika pemda menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Wibowo (2004), Pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Dengan konsep ini maka hipotesis untuk melihat pengaruh PKt terhadap Belanja Daerah adalah:

H3 : Pendapatan perkapita (PKt) $t-1$ berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (BD) t .

2.7. Model Penelitian



2.8. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menitikberatkan kepada pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan pendapatan perkapita terhadap belanja daerah yang berasal dari realisasi pendapatan dan belanja Provinsi DIY selama 5 tahun berturut-turut yaitu tahun 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009. Variabel dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan jika memiliki tingkat signifikansi $< 0,05$.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan individu atau unit-unit yang dijadikan objek penelitian. Dari sekumpulan individu tersebut akan dijadikan pedoman untuk membuat suatu kesimpulan. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh laporan realisasi pendapatan dan belanja provinsi DIY pada tahun 2005-2009.

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diambil peneliti untuk dilakukan penelitian, dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), pendapatan perkapita (PKt) dan belanja daerah (BD).

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan diambil adalah data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi DIY pada 5 tahun terakhir yaitu 2005-2009. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi DIY, dan sumber lain yang layak untuk dijadikan sumber penelitian.

3.3. Variabel Yang Digunakan

3.3.1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja daerah (BD). Belanja daerah merupakan semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja dapat dikategorikan berdasarkan karakteristiknya yaitu: (1) Belanja selain modal (belanja administrasi umum; Belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik; belanja transfer; belanja tak terduga). (2) Belanja modal.

3.3.2. Variabel Independen

Variabel independent dalam penelitian ini adalah PAD, DAU dan Pendapatan perkapita.

3.3.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Variabel PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3.3.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Variabel DAU merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan

untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

3.3.2.3. Pendapatan perkapita (PKt)

Pendapatan perkapita merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan *standar of living* suatu negara/daerah. Daerah yang memiliki pendapatan perkapita tinggi biasanya memiliki *standar of living* yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang positif

3.4. Metode Analisa Data

3.4.1. Statistik Deskriptif

Metode deskriptif adalah data-data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Metode ini menggambarkan data penelitian yang berkaitan dengan homogenitas dan normalitas data karena pengambilan keputusan yang didasarkan pada data normal dan tidak homogen lemah (Syamsul Hadi, 2006).

3.4.2. Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan multikolonieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

2. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi.

Menurut Kuncoro, deteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dengan cara melihat besarnya nilai D-W (durbin-Watson). Standar utama yang dijadikan batasan adalah:

- Nilai D-W lebih besar dari batas atas (d_U), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, yang berarti tidak ada autokorelasi positif.
- Bila nilai D-W lebih rendah dari batas bawah (d_L), maka koefisien autokorelasi sala lebih besar nol, yang berarti ada autokorelasi positif.
- Bila nilai D-W terletak diantara batas atas (d_U) dn batas bawah (d_L), maka tidak dapat disimpulkan.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas adalah menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dari

suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya berbeda, maka disebut heterokedastisitas.

Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain, jika terdapat perbedaan varian, maka dijumpai gejala heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot disekitar nilai X dan Y. Jika ada pola tertentu, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas.

4. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistic tidak valid terhadap jumlah sampel yang kecil.

5. Uji Linearitas

Uji Linearitas adalah pengujian yang bertujuan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau

tidak. Dengan uji linieritas akan diperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linear, kuadrat atau kubik.

3.4.3. Analisis Uji Regresi Sederhana

Regresi sederhana digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel terhadap Belanja Daerah secara terpisah dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX_i + \varepsilon$$

Keterangan:

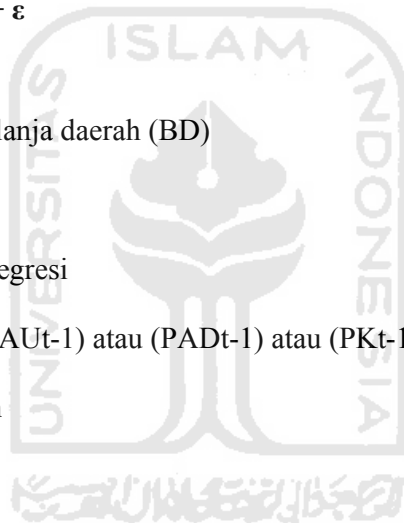
Y : jumlah belanja daerah (BD)

α : konstanta

b : koefisien regresi

X : jumlah (DAUt-1) atau (PADt-1) atau (PKt-1)

ε : Error Term



3.4.4. Analisis Uji Regresi Berganda

Regresi berganda digunakan untuk memprediksi apakah komponen-komponen pendapatan daerah bersama-sama mempengaruhi belanja daerah. Persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$BD = \alpha + \beta_1(PAD) + \beta_2(DAU) + \beta_3(PKt) + \varepsilon$$

Keterangan:

BD = probabilitas mendapatkan belanja daerah

α	= konstanta
PAD	= pendapatan asli daerah
DAU	= dana alokasi umum
PKt	= pendapatan perkapita
ε	= Error Term



BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pengumpulan data yang berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Pemerintah Kabupaten/kota se propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Analisis data ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah.

Teknik analisis yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif yaitu analisis yang menjelaskan tentang gambaran data-data variabel penelitian yang terdiri dari rata-rata, standar deviasi, nilai tertinggi dan nilai terendah. Sedangkan analisis statistik merupakan analisis yang dilakukan dengan pembuktian statistik untuk membuktikan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini analisis statistik digunakan analisis Regresi Linier Sederhana dan Analisis Regresi Linier Berganda.

4.1 Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel penelitian dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Hasil Deskriptif Dana Alokasi Umum

Kabupaten / Kota	2005	2006	2007	2008	2009
Sleman	318,139,000	485,397,000	543,065,000	592,594,528	587,857,778
Bantul	308,106,000	470,847,000	524,293,000	583,169,351	568,502,143
Kulon Progo	231,438,000	344,035,000	378,145,130	403,656,783	413,081,642
Gunung Kidul	268,325,000	432,868,000	459,851,000	504,395,748	508,217,508
Kota Yogyakarta	201,231,000	316,832,000	365,042,000	411,257,232	414,345,000
Rata-rata	265,447,800	409,995,800	454,079,226	499,014,728	498,400,814
Perkembangan DAU (%)		54.5%	10.8%	9.9%	-0.1%
Rata-rata keseluruhan	425,387,674				
Standar deviasi	112987106.3				

Deskriptif terhadap DAU memiliki rata-rata sebesar Rp. 425.387,674 ribu dan standar deviasi sebesar 112.987.106. Nilai DAU tertinggi terjadi di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 dengan nilai DAU sebesar Rp.592.594.528 ribu dan DAU terendah terjadi di Kota Yogyakarta pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp.201.231.000 ribu. Ditinjau dari perkembangan DAU, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu mencapai 54,5% yaitu dari Rp.265.447.800 ribu pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp.409.995.800 ribu pada tahun 2006.

Selama periode penelitian pertumbuhan DAU bernilai positif sepanjang tahun menunjukkan bahwa pertumbuhan DAU di kabupaten/kota se propinsi DIY mengalami peningkatan selama periode penelitian yaitu tahun 2005 - 2009. Peningkatan DAU ini disebabkan karena transfer dana pemerintah pusat ke daerah semakin besar, artinya kebutuhan fiskal provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami peningkatan sehingga alokasi DAU nya juga relatif besar.

Tabel 4.2. Hasil Deskriptif Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten / Kota	2005	2006	2007	2008	2009
Sleman	77,904,743	90,710,095	120,656,549	140,631,359	157,231,268
Bantul	37,683,848	44,005,311	57,229,727	69,800,762	88,691,363
Kulon Progo	24,332,483	35,203,275	38,882,765	42,286,238	39,358,629
Gunung Kidul	24,187,560	29,801,036	28,878,356	32,907,615	38,613,310
Kota Yogyakarta	89,196,417	96,419,456	114,098,351	132,431,572	161,482,000
Rata-rata	46,307,249.40	59,227,834.60	71,949,149.60	83,611,509.20	97,075,314.00
Perkembangan PAD (%)		27.90%	21.48%	16.21%	16.10%
Rata-rata keseluruhan	71,634,211.36				
Standar deviasi	45,325,606.68				

Deskriptif terhadap PAD memiliki rata-rata sebesar Rp.71.634.211,36 ribu dan standar deviasi sebesar 45.525.606,68. Nilai PAD tertinggi terjadi di kota Yogyakarta pada tahun 2009 dengan nilai PAD sebesar Rp.161.482.000 ribu dan

PAD terendah terjadi di kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp.24.187.560 ribu. Ditinjau dari perkembangan PAD, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu mencapai 27,9% yaitu dari Rp.46.307.249,40 ribu pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp.59.227.834,60 ribu pada tahun 2006.

Selama periode penelitian pertumbuhan PAD bernilai positif sepanjang tahun menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD di kabupaten/kota se propinsi DIY mengalami peningkatan secara kontinyu. Peningkatan PAD ini disebabkan karena sumber-sumber penerimaan daerah yang terus mengalami peningkatan terutama sumber yang berasal dari pajak untuk kabupaten Sleman dan Kodya Yogyakarta serta sumber pendapatan yang berasal dari retribusi untuk kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul.

Tabel 4.3. Hasil Deskriptif Pendapatan Perkapita

Kabupaten / Kota	2005	2006	2007	2008	2009
Sleman	5,082,668	5,240,006	5,408,803	5,612,511	5,789,440
Bantul	3,712,307	3,732,268	3,845,008	3,976,712	4,097,212
Kulon Progo	3,920,799	4,075,587	4,239,954	4,435,553	4,609,781
Gunung Kidul	4,000,253	4,141,652	4,292,535	4,470,621	4,649,134
Kota Yogyakarta	10,104,516	10,319,070	10,587,919	10,989,241	11,336,224
Rata-rata	5,364,109	5,501,717	5,674,844	5,896,928	6,096,358
Perkembangan PKt (%)		2.6%	3.1%	3.9%	3.4%
Rata-rata keseluruhan	5,706,791				
Standar deviasi	2602103.245				

Deskriptif terhadap Pendapatan perkapita memiliki rata-rata sebesar Rp.5.706.791 ribu dan standar deviasi sebesar 2.602.103,245. Nilai Pendapatan perkapita tertinggi terjadi di kota Yogyakarta pada tahun 2009 dengan nilai Pendapatan perkapita sebesar Rp.11.336.224 ribu dan Pendapatan perkapita terendah terjadi di kabupaten Bantul pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp.3.712.307 ribu. Ditinjau dari perkembangan Pendapatan perkapita, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu mencapai 3,9% yaitu dari Rp.5.674.844 ribu pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp.5.896.928 ribu pada tahun 2008. Selama periode penelitian pertumbuhan Pendapatan perkapita provinsi DIY terus mengalami peningkatan atau bernilai positif, artinya *standar of living* provinsi DIY semakin meningkat dan pertumbuhan ekonominya juga positif.

Tabel 4.4. Hasil Deskriptif Belanja Daerah

Kabupaten / Kota	2005	2006	2007	2008	2009
Sleman	508,279,544	609,765,409	752,113,976	906,618,990	1,016,025,604
Bantul	417,798,070	545,132,136	676,835,482	1,045,423,303	903,767,000
Kulon Progo	286,529,399	458,909,862	492,840,107	598,059,934	577,736,996
Gunung Kidul	352,144,433	503,624,606	575,683,751	717,302,227	694,407,909
Kota Yogyakarta	399,244,605	496,768,977	569,120,372	698,566,664	1,016,025,604
Rata-rata	392,799,210	522,840,198	613,318,738	793,194,224	841,592,623
Perkembangan BD (%)		33.1%	17.3%	29.3%	6.1%
Rata-rata keseluruhan	632,748,998				
Standar deviasi	210511067.7				

Deskriptif terhadap Belanja Daerah memiliki rata-rata sebesar Rp.632.748.998 ribu dan standar deviasi sebesar 210.511.067,7. Nilai Belanja Daerah tertinggi terjadi di kota Yogyakarta pada tahun 2008 dengan nilai Belanja Daerah sebesar Rp.1.045.423.303 ribu dan Belanja Daerah terendah terjadi di kabupaten Kulon Progo pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp.286.529.399 ribu.

Ditinjau dari perkembangan Belanja Daerah, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu mencapai 33,1% yaitu dari Rp.392.799.210 ribu pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp.522.840.198 ribu pada tahun 2006. Selama periode penelitian pertumbuhan Belanja Daerah provinsi DIY mengalami peningkatan. Pos belanja daerah yang paling besar adalah pembiayaan pegawai atau belanja pegawai, dimana pengeluaran untuk belanja pegawai hampir setengah dari keseluruhan belanja daerah. Belanja daerah terus mengalami peningkatan karena pemerintah daerah diberikan wewenang otonomi seperti belanja tanah, belanja pembangunan jalan, instalasi, jaringan, alat-alat kesehatan dan fasilitas publik lainnya.

4.2. Analisis Statistik

Pengujian hipotesis menggunakan analisis data panel (*pooled data*). Hasil model analisis data ini telah lolos telah melewati uji asumsi klasik standar yang sudah umum dilakukan dalam pemodelan ekonomi. Uji asumsi klasik yang telah dilakukan adalah uji normalitas data, multikolinearitas, heteroskedastis, otokorelasi dan uji linieritas.

4.2.1. Uji Asumsi Klasik

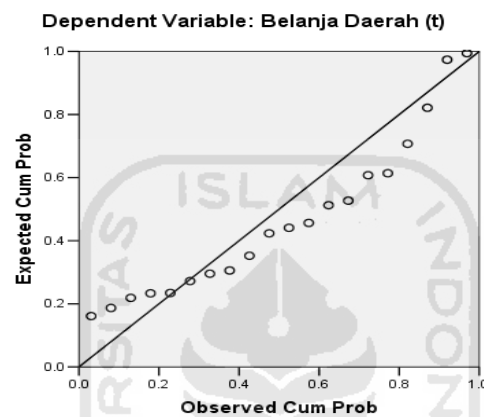
Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari.

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot*. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

Hasil Uji Normalitas tersebut dapat di tampilkan pada gambar berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas

Dari gambar 4.1 diatas dapat diketahui jika grafik histogram menunjukkan pola yang mendekati bentuk bel dan plot linear dan memperlihatkan data yang bergerak mengikuti garis linear diagonal maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Gejala

multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation faktor* (VIF) di atas 10.

Tabel di di bawah menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas yang terjadi pada variabel DAU, PAD, dan Pendapatan perkapita dimana nilai *tolerance*-nya di atas 0,1 dan nilai VIF-nya tidak lebih besar dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa antarvariabel-variabel tersebut tidak terdapat korelasi sehingga tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Hasil uji multikolinieritas dapat ditunjukkan pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	T	VIF	Keterangan
PAD (t-1)	0.262	3.819	Tidak terjadi multikolinieritas
DAU (t-1)	0.457	2.187	Tidak terjadi multikolinieritas
PKt (t-1)	0.267	3.739	Tidak terjadi multikolinieritas

a Dependent Variabel: Belanja daerah

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2011

c. Uji Autokorelasi

Pengujian ini digunakan untuk menguji asumsi klasik regresi berkaitan dengan adanya autokorelasi. Pengujian ini menggunakan model Durbin-Watson (*dw test*). Model regresi yang baik adalah model yang tidak

mengandung autokorelasi. Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel *error-term* pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel *error-term* pada periode lain yang bermakna variabel *error-term* tidak random. Pelanggaran terhadap asumsi ini berakibat interval keyakinan terhadap hasil estimasi menjadi melebar sehingga uji signifikansi tidak kuat. Langkah pendeteksian adanya autokorelasi adalah dengan membandingkan nilai Durbin-watson statistic tabel.

Berdasarkan $N=20$ dan $k=3$ diperoleh nilai tabel $DWL = 0,998$ dan $DWU=1,676$, sehingga nilai $4-DWU = 2,324$ dan $4-DWL = 3,002$.

Hasil Uji Durbin Watson dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.882 ^a	.779	.737	91818867.2	1.868

a. Predictors: (Constant), PKt (t-1), DAU (t-1), PAD (t-1)

b. Dependent Variable: Belanja Daerah (t)

Dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson berada pada daerah III yaitu antara DWU sampai dengan 4-DWU ($1,676 < 1,868 < 2,324$) sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

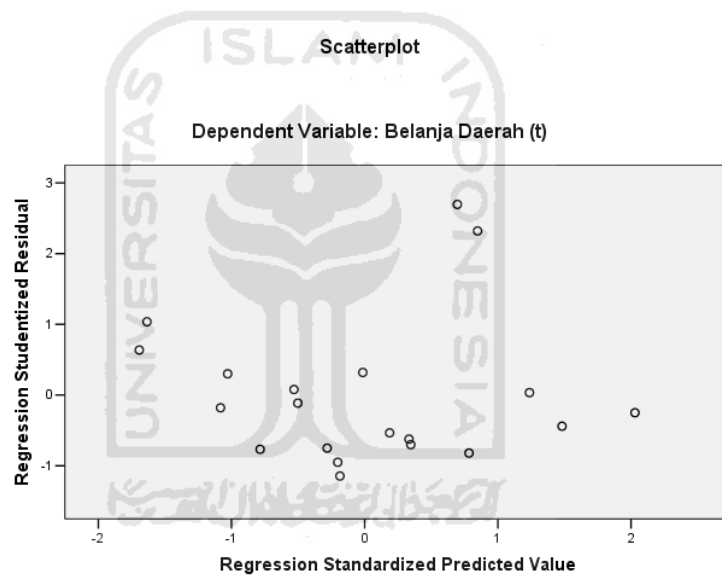
d. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat penyebaran data. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Model regresi yang

baik adalah yang tidak terdapat heterokedastisitas. Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heterokedastisitas.

Gambar 4.2

Scatterplot untuk uji heterokedastisitas



e. Uji Linearitas

Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Dengan uji linieritas akan diperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linier, kuadrat atau kubik. Uji Linearitas yang digunakan dalam penelitian adalah uji lagrange multiplier.

Estimasi dengan uji ini bertujuan untuk mendapatkan nilai X^2 hitung atau ($n \times R^2$). Hasil uji linearitas dapat ditunjukkan pada Tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.7
Uji Linearitas

<i>R Square</i>	<i>N</i>	<i>X² hitung</i> <i>= NxR²</i>	<i>X² Tabel (DF = 20</i> <i>-3=16)</i>	<i>Keterangan</i>
0,004	20	0,08	26,2962	Linear

Sumber: Data primer diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai X^2 hitung $< X^2$ tabel ($0,08 < 26,2962$). Dengan demikian model regresi ini telah memenuhi asumsi linearitas.

4.2.2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk mengetahui pengaruh $DAU_{(t-1)}$ terhadap Belanja Daerah, pengaruh $PAD_{(t-1)}$ terhadap belanja daerah dan pengaruh $PKt_{(t-1)}$ terhadap belanja daerah digunakan analisis Regresi Linier Sederhana. Hasil Regresi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Dependent	Independen	Koefisien	Beta	t	p-value	R Square.
Belanja Daerah	Constanta	150.457.096,5		1,528	0,144	0,644
	DAU (t-1)	1,332	0,803	5,708	0,000	
Belanja Daerah	Constanta	504.466.970,3		7,584	0,000	0,644
	PAD (t-1)	2,884	0,614	3,301	0,004	
Belanja Daerah	Constanta	646.503.623,1		6,123	0,000	0.013
	PKt (t-1)	8,242	0,112	0,480	0,637	

Sumber : Data sekunder diolah, 2011

Pada penelitian ini digunakan model persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y_{(t)} = a + b_1 X_{(t-1)} + e$$

Dengan memperhatikan model regresi model Lag 1 maka didapat persamaan tentang pengaruh DAU tahun sebelumnya terhadap Belanja Daerah tahun berjalan, pengaruh PAD tahun sebelumnya terhadap Belanja Daerah dan pengaruh PKt tahun sebelumnya terhadap Belanja Daerah tahun berjalan.

$$\text{Belanja Daerah (t)} = 150457096,5 + 1,332 \text{ DAU (t-1)} \dots\dots\dots 1$$

$$\text{Belanja Daerah (t)} = 504466970,3 + 2,884 \text{ PAD (t-1)} \dots\dots\dots 2$$

$$\text{Belanja Daerah (t)} = 646503623,1 + 8,242 \text{ PKt (t-1)} \dots\dots\dots 3$$

4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui pengaruh DAU, PAD, dan PKt terhadap Belanja daerah digunakan analisis Regresi Linier Berganda. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05.

Tabel 4.9
Pengujian Regresi Berganda

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5E+017	3	1.792E+017	20.592	.000 ^a
	Residual	1E+017	16	8.702E+015		
	Total	7E+017	19			

a. Predictors: (Constant), PKt (t-1), DAU (t-1), PAD (t-1)

b. Dependent Variable: Belanja Daerah (t)

Tabel 4.9 menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dengan hasil nilai signifikansi F sebesar 0,000 di bawah 0,05 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen: DAU, PAD dan PKt berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja daerah. Hal ini berarti semakin besar

DAU, PAD dan didukung dengan pendapatan perkapita masyarakat yang tinggi maka belanja daerah juga semakin meningkat. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa DAU, PAD, dan PKT secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, dapat didukung.

4.2.4 Pengujian Ketepatan Perkiraan Model (*Goodness of Fit Test*)

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (adjusted R-square). Hasil pengujian Goodness of Fit dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.10
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.882(a)	.779	.737	91818867.15923	1.868

a Predictors: (Constant), PKt (t-1), DAU (t-1), PAD (t-1)

b Dependent Variabel: Belanja Daerah (t)

Berdasarkan Tabel 4.10 didapatkan nilai koefisien determinasi (adjusted R-square) sebesar 0,737 yang berarti model dapat menjelaskan variasi belanja daerah sebesar 73,7 persen dan sisanya sebesar 26,3 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

4.3. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan model uji regresi linier sederhana menunjukkan bahwa hanya variabel PAD dan DAU yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan pendapatan perkapita tidak berpengaruh positif dan signifikan.

4.3.1. Pengaruh DAU tahun sebelumnya terhadap Belanja Daerah tahun berjalan

Berdasarkan nilai persamaan 1 maka besarnya konstanta sebesar 150457096,5 dapat diartikan jika tidak ada DAU pada periode tahun sebelumnya di pemerintah daerah kabupaten propinsi se-DIY, maka besarnya Belanja Daerah tahun berjalan akan sebesar 150457096,5 ribu. Namun jika dipengaruhi oleh DAU sebesar 1% maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 1,332% dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa diperoleh t statistik sebesar 5,708 dan p-value sebesar 0,000 yang nilainya kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak yang berarti $DAU_{(t-1)}$ berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti semakin besar nilai DAU maka semakin tinggi pula Belanja Daerah. Dengan demikian Hipotesis pertama yang menyatakan DAU berpengaruh positif terhadap realisasi belanja daerah dapat didukung.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menemukan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah dalam APBD. Hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Dengan demikian besarnya Dana Alokasi Umum, akan mempengaruhi besarnya anggaran yang akan digunakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan Belanja Daerahnya.

4.3.2. Pengaruh PAD tahun sebelumnya terhadap Belanja Daerah tahun berjalan

Berdasarkan nilai persamaan 2 maka besarnya konstanta sebesar 504.466.970,3 dapat diartikan jika tidak ada PAD pada periode tahun sebelumnya di pemerintah daerah kabupaten propinsi se DIY, maka besarnya Belanja Daerah tahun berjalan akan sebesar 504.466.970,3 ribu.

Namun jika dipengaruhi oleh PAD sebesar 1% maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 2,884% dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa diperoleh t statistik sebesar 3,301 dan p-value sebesar 0,004 yang nilainya kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak yang berarti $PAD_{(t-1)}$ berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti semakin besar nilai PAD maka semakin tinggi pula Belanja Daerah. Dengan demikian Hipotesis kedua yang menyatakan PAD berpengaruh positif terhadap realisasi belanja daerah dapat didukung.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah dalam APBD. Hal ini disebabkan karena Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin besar nilai PAD maka semakin besar pula sumber dana yang dihasilkan dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga memberikan stimulus untuk meningkatkan belanja daerah. Belanja daerah terbagi dalam 2 pos yaitu (1) belanja langsung (barang dan jasa, belanja modal dan belanja pegawai) dan (2) belanja tidak langsung (belanja hibah,

bunga, tak terduga dan lain – lain). Jadi semakin besar Pendapatan yang diperoleh dari PAD maka semakin besar pula dana yang harus disalurkan lewat belanja daerah.

4.3.3. Pengaruh PKt tahun sebelumnya terhadap Belanja Daerah tahun berjalan

Berdasarkan nilai persamaan 3 maka besarnya konstanta sebesar 646.503.623,1 dapat diartikan jika tidak ada PKt pada periode tahun sebelumnya di pemerintah daerah kabupaten propinsi se DIY, maka besarnya Belanja Daerah tahun berjalan akan sebesar 646.503.623,1 ribu. Namun jika dipengaruhi oleh PKt sebesar 1% maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 8,242% dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa diperoleh t statistik sebesar 0,480 dan p-value sebesar 0,637 yang nilainya lebih dari 0,05, maka H_0 diterima yang berarti PKt ($t-1$) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian Hipotesis ketiga yang menyatakan PKt berpengaruh positif terhadap relaisasi belanja daerah tidak dapat didukung.

Pendapatan perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja daerah. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya gap atau kesenjangan antara pendapatan perkapita daerah dengan perkotaan sehingga pertumbuhan ekonomi belum merata antara kota dan daerah pinggiran,

dimana Kota Yogyakarta dapat dikatakan kutub pertumbuhan ekonomi di provinsi DIY. Hal ini akan berdampak pada pembelanjaan anggaran rumah tangga antara masyarakat kota dan daerah pinggiran, dimana masyarakat kota pembelanjaan anggarannya cenderung lebih tinggi dibanding masyarakat daerah pinggiran, sehingga pertumbuhan sektor ekonomi perkotaan lebih tinggi. Akibat masih rendahnya pendapatan perkapita di daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi maka pembangunan daerah juga tidak mengalami perubahan sehingga tidak mempengaruhi belanja daerah yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi DIY.

Khusus kabupaten Bantul pada tahun 2006-2007 pengaruh terjadinya bencana alam, gempa bumi, tidak serta merta menurunkan besarnya pendapatan perkapita masyarakat kawasan tersebut. Berdasarkan data BPS Propinsi DIY, pendapatan perkapita Bantul pada tahun 2006 sebesar Rp3.732.268,00 dan 2007 sebesar Rp 3.845.008,00 dan peningkatan tersebut sebesar 3%. Meningkatnya pendapatan perkapita Bantul disebabkan beberapa sektor seperti pertanian, pertambangan&penggalian, industri pengolahan tidak mengalami penurunan pasca gempa. Penurunan pada tahun 2006-2007 terjadi pada sektor perhotelan dari Rp 11.587.000.000, menjadi Rp 10.991.000.000,00 yang turun sekitar 5%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan :

1. Terdapat pengaruh secara positif dan signifikan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di kabupaten / kota Se DIY. Hal ini besar kecilnya Dana Alokasi Umum mampu memberikan dampak positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Daerah.
2. Terdapat pengaruh secara positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di kabupaten / kota Se DIY. Hal ini besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah mampu memberikan dampak positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Daerah.
3. Tidak terdapat pengaruh secara positif dan signifikan Pendapatan perkapita terhadap Belanja Daerah di kabupaten / kota Se DIY. Hal ini berarti besar kecilnya Pendapatan perkapita belum mampu memberikan dampak positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Daerah.
4. Terdapat pengaruh secara bersama - sama dan signifikan $DAU_{(t-1)}$, $PAD_{(t-1)}$, $PKt_{(t-1)}$ terhadap Belanja Daerah di kabupaten / kota Se DIY. Hal ini berarti semakin tinggi $DAU_{(t-1)}$, $PAD_{(t-1)}$, $PKt_{(t-1)}$ pengalokasian anggaran Belanja Daerah juga semakin meningkat.

5.2. Implikasi

Berpengaruhnya PAD dan DAU secara signifikan terhadap belanja daerah, tentunya semakin mendorong pemda DIY untuk lebih jeli lagi dalam pengisian anggaran untuk publik. Dengan ketepatan pengalokasian anggaran, diharapkan pertumbuhan ekonomi DIY naik dan pendapatan perkapita juga akan meningkat. Pengawasan lebih ketat dalam penggunaan anggaran haruslah dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan dana tersebut. Selain itu, pemda DIY sebaiknya memaksimalkan PAD yang diperoleh dengan beberapa cara misalnya untuk daerah wisata seperti Bantul dan Gunungkidul yang kaya akan potensi pantainya, dalam hal promosi lebih digiatkan dan digencarkan, sarana pendukung yang menuju obyek wisata diperbaiki&ditambah, sehingga pengunjung semakin banyak yang berujung menaikkan potensi PAD DIY.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Temuan-temuan dalam kasus ini menunjukkan beberapa hal yang sangat teoritis dapat dipahami. Namun, dalam tataran praktis masih perlu didiskusikan lebih jauh. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam studi-studi selanjutnya. Karena studi ini belum mencakup aspek-aspek lain yang mungkin merupakan faktor penting, misalnya aspek kebijakan publiknya, aspek politisnya, aspek manajemen keuangannya, aspek penganggaran daerah, aspek psikologis personalitas pembuat keputusan pemda

5.4. Saran

1. Bagi pemerintah daerah provinsi DIY hendaknya dalam melakukan eksploitasi Pendapatan Asli Daerah hendaknya lebih proporsional dan disesuaikan dengan besarnya belanja untuk pelayanan publik, sehingga pendapatan yang diterima dapat digunakan untuk kemakmura rakyat. Besarnya anggaran Belanja daerah ini hendaknya pula disesuaikan dengan pendapatan perkapita dan besarnya Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah hendaknya lebih menerapkan sistem *good governance*, sehingga dalam implementasi belanja daerah dapat dikontrol dengan baik dari penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi dan manipulasi anggaran, sehingga pelaksanaannya benar-benar mampu meningkatkan pelayanan publik dan dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menggunakan jumlah observasi lebih dari 20 data, dengan melakukan penambahan obyek dan tahun penelitian.

Daftar Pustaka

- Abimanyu, Anggito, *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*, BAPEKKI Depkeu, 2005.
- Adi, Priyo Hari, *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se-Jawa-Bali)*, Simposium Nasional Akuntansi IX, 2006.
- Arsyad, Lincoln, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta, Bagian Penerbitan STIE YKPN, 2004.
- Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2003.
- Bird, Richard M dan Francois Vaillancourt, *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang, Terjemahan*, Jakarta, Gramedia, 2000.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY, *Statistik Keuangan Daerah Tahun 2005*, Yogyakarta, 2005.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY, *Statistik Keuangan Daerah Tahun 2006*, Yogyakarta, 2006.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY, *Statistik Keuangan Daerah Tahun 2007*, Yogyakarta, 2007.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY, *Statistik Keuangan Daerah Tahun 2008*, Yogyakarta, 2008.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY, *Statistik Keuangan Daerah Tahun 2009*, Yogyakarta, 2009.
- Case, Karl E dan Fair, Ray C, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Edisi Kedelapan Jilid 1*, Jakarta, Erlangga, 2007.
- Darwanto, Yulia Yustikasari, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Simposium Nasional Akuntansi X, 2007.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta, Erlangga, 1996.
- Dewi, Elita, *Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sumatra Utara, USU digital library, 2002.
- Gasperz, V dan E. Feonay, *Kinerja Pendapatan Ekonomi Rakyat dan Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel Th.II No.8, 2003.


- Hadi, Syamsul, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Akuntansi & Keuangan*, Yogyakarta, Ekonisia, 2006.
- Halim, Abdul, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama*, Jakarta, Salemba Empat, 2002.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Simposium Nasional Akuntansi VI, 2003.
- Halim, Abdul, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi Akuntansi Sektor Publik, Jakarta, Salemba Empat, 2004.
- Hamid, Edy Suandy, *Formula Alternatif Dana Alokasi Umum (DAU), Upaya Mengatasi Masalah Ketimpangan Fiskal dalam Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta, UII Press, 2005.
- Hariato, David dan Priyo Hari Adi, *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan perkapita*, Simposium Nasional Akuntansi X, 2007.
- Ismerdekaningsih, Herlina, S.E., dan Endah Sri Rahayu, S.E., *Analisis Hubungan Penerimaan Pajak Terhadap Product Domestic Bruto di Indonesia (Studi Tahun 1985-2000)*, ITB Central Library, Bandung, 2002.
- Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988.
- Kuncoro, Mudrajat, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2000.
- Kuncoro, Mudrajat, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan Strategi dan Peluang*, Penerbit Erlangga, 2004.
- Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2002.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Andi, 2002.
- Mubyarto dan Daniel W. Bromley, *A Development Alternative for Indonesia*, Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2002.
- Oktavia, Putu, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan/Kapita*, MET 08.05 Analisis Makroekonomi Tugas 2, 2005.
- Prakosa, Kesit Bambang, *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)*, JAAI Volume 8, 2004.

- Rahayu, Retno Puji dan Purbayu Budi Santosa, *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri*, Jurnal Vol 2, No 1/Juli 2005: 9-18, 2005.
- Saragih, Juli Panglima, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, 2003.
- Sidik, Machfud, Benedictus Raksaka Mahi, Robert Arthur Simanjuntak, dkk, *Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan, Dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, Jakarta, Kompas, 2002.
- Silalahi, TB, et al, *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*, Jakarta, PT Sinar Agape Press, 1995.
- Sondakh, L. W, *Mencari Platform Otonomisasi Daerah dalam Krisis Ekonomi*, Makalah Seminar Nasional Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan Potensi, Jakarta, 1999.
- Wibowo, Bara Ardi, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pendapatan perkapita Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Skripsi S-1, fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, 2006

<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?page=1>

<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD>

LAMPIRAN

The watermark logo of Universitas Islam Indonesia is centered behind the title. It features a stylized emblem with a central figure resembling a person or a symbol, flanked by the text 'UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA' in a circular arrangement. Below the emblem is a line of Arabic calligraphy.

LAMPIRAN 1
Realisasi Pendapatan dan Belanja Provinsi DIY Tahun 2005

Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2005 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	391.886.902
1.1	Pendapatan Asli Daerah	89.196.417
1.2	Dana Perimbangan	289.257.621
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	13.432.865
II	Belanja Daerah	399.244.605
2.1	Belanja Aparatur Daerah	64.390.925
2.2	Belanja Pelayanan Publik	287.891.596
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan	45.118.548
2.4	Belanja Tidak Tersangka	1.843.536
	Surplus/Defisit	(7.357.703)
III	Pembiayaan	7.357.703

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta
Tahun 2005 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	89.196.417
1.1	Pajak Daerah	46.106.723
1.2	Retribusi Daerah	22.797.439
1.3	Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.651.535
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.640.720
II	Dana Perimbangan	289.257.621
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	39.446.429
2.2	Dana Alokasi Umum	201.231.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	6.600.000
2.4	Dana Perimbangan dari Propinsi	41.980.191
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	13.432.865
	Jumlah Pendapatan Daerah	391.886.902

Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun
2005 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Belanja Aparatur Daerah	64.390.925
1.1	Belanja Administrasi Umum	28.980.600
1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	20.844.065
1.3	Belanja Modal	14.566.260
II	Belanja Pelayanan Publik	287.891.596
2.1	Belanja Administrasi Umum	188.968.326
2.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	43.301.882
2.3	Belanja Modal	55.621.388
III	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan	45.118.548
IV	Belanja Tidak Tersangka	1.843.536
	Jumlah Belanja Daerah	399.244.605



Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2005 (000 Rp)

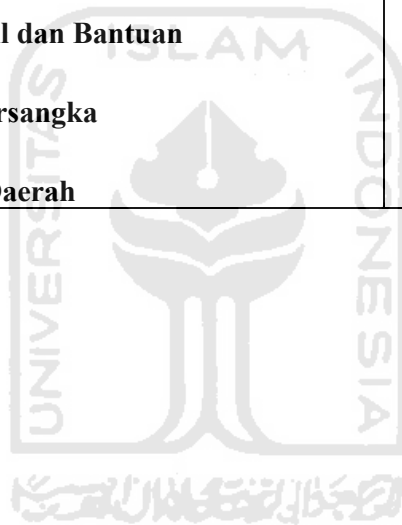
No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	520.548.875
1.1	Pendapatan Asli Daerah	77.904.743
1.2	Dana Perimbangan	417.13.902
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	25.230.230
II	Belanja Daerah	508.279.544
2.1	Belanja Aparatur Daerah	101.886.834
2.2	Belanja Pelayanan Publik	362.834.820
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan	43.057.890
2.4	Belanja Tidak Tersangka	500.000
	Surplus/Defisit	12.269.331
III	Pembiayaan	(12.269.331)

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2005 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	77.904.743
1.1	Pajak Daerah	36.638.631
1.2	Retribusi Daerah	30.067.557
1.3	Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.028.081
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.170.474
II	Dana Perimbangan	417.413.902
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	46.647.017
2.2	Dana Alokasi Umum	318.139.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	10.600.000
2.4	Dana Perimbangan dari Propinsi	42.027.885
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	25.230.230
	Jumlah Pendapatan Daerah	520.548.875

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2005 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Belanja Aparatur Daerah	101.886.834
1.1	Belanja Administrasi Umum	69.591.681
1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	27.031.238
1.3	Belanja Modal	5.263.916
II	Belanja Pelayanan Publik	362.834.820
2.1	Belanja Administrasi Umum	255.577.666
2.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	38.923.498
2.3	Belanja Modal	68.333.657
III	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan	43.057.890
IV	Belanja Tidak Tersangka	500.000
	Jumlah Belanja Daerah	508.279.544



Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Tahun Bantul 2005 (000 Rp)

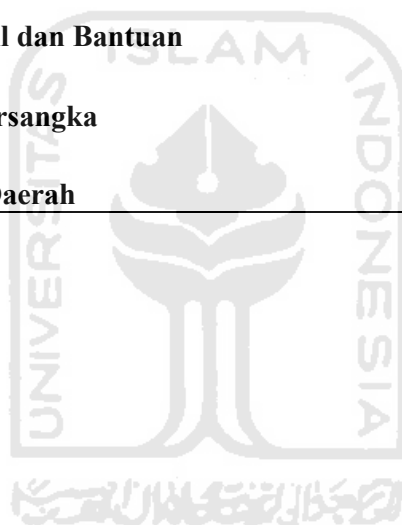
No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	442.291.640
1.1	Pendapatan Asli Daerah	37.683.848
1.2	Dana Perimbangan	368.873.602
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	35.734.190
II	Belanja Daerah	417.798.070
2.1	Belanja Aparatur Daerah	106.322.669
2.2	Belanja Pelayanan Publik	272.490.613
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan	37.872.700
2.4	Belanja Tidak Tersangka	1.112.088
	Surplus/Defisit	24.493.570
III	Pembiayaan	(24.493.570)

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tahun Bantul 2005 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	37.683.848
1.1	Pajak Daerah	7.837.547
1.2	Retribusi Daerah	23.792.333
1.3	Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.912.786
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.141.182
II	Dana Perimbangan	368.873.602
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	24.902.964
2.2	Dana Alokasi Umum	308.106.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	12.060.000
2.4	Dana Perimbangan dari Propinsi	23.804.638
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	35.734.190
	Jumlah Pendapatan Daerah	442.291.640

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tahun Bantul 2005 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Belanja Aparatur Daerah	106.322.669
1.1	Belanja Administrasi Umum	85.774.899
1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	15.409.962
1.3	Belanja Modal	5.137.808
II	Belanja Pelayanan Publik	272.490.613
2.1	Belanja Administrasi Umum	212.318.851
2.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	31.136.056
2.3	Belanja Modal	29.035.706
III	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan	37.872.700
IV	Belanja Tidak Tersangka	1.112.088
	Jumlah Belanja Daerah	417.798.070



Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2005 (000 Rp)

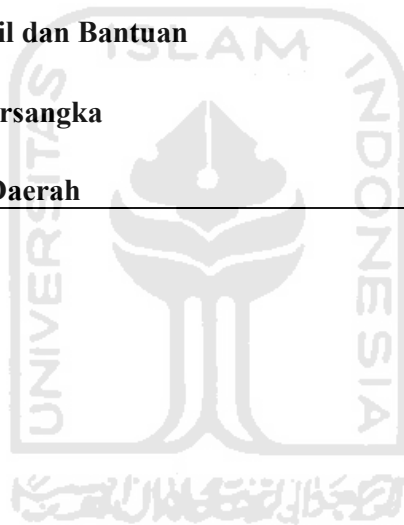
No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	307.791.005
1.1	Pendapatan Asli Daerah	24.332.483
1.2	Dana Perimbangan	268.068.879
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	15.389.643
II	Belanja Daerah	286.529.399
2.1	Belanja Aparatur Daerah	41.001.418
2.2	Belanja Pelayanan Publik	226.145.206
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan	18.431.403
2.4	Belanja Tidak Tersangka	951.373
	Surplus/Defisit	21.261.606
III	Pembiayaan	(21.261.606)

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2005 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	24.332.483
1.1	Pajak Daerah	2.488.959
1.2	Retribusi Daerah	16.216.180
1.3	Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.580.921
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.046.423
II	Dana Perimbangan	268.068.879
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	13.854.261
2.2	Dana Alokasi Umum	231.438.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	11.360.000
2.4	Dana Perimbangan dari Propinsi	11.416.618
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	15.389.643
	Jumlah Pendapatan Daerah	307.791.005

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2005 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Belanja Aparatur Daerah	41.001.418
1.1	Belanja Administrasi Umum	32.341.036
1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	7.969.753
1.3	Belanja Modal	690.628
II	Belanja Pelayanan Publik	226.145.206
2.1	Belanja Administrasi Umum	171.268.345
2.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	42.603.675
2.3	Belanja Modal	12.273.187
III	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan	18.431.403
IV	Belanja Tidak Tersangka	951.373
	Jumlah Belanja Daerah	286.529.399



Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 (000 Rp)

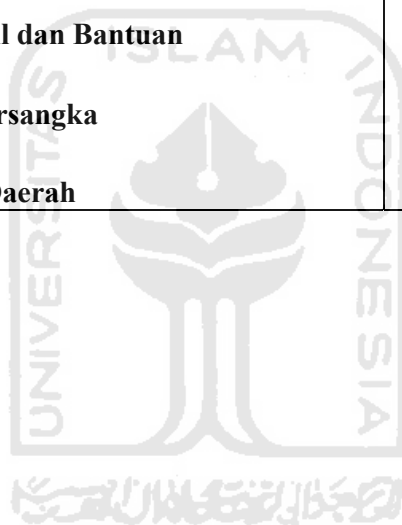
No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	351.298.025
1.1	Pendapatan Asli Daerah	24.187.456
1.2	Dana Perimbangan	308.052.392
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	19.058.178
II	Belanja Daerah	352.144.433
2.1	Belanja Aparatur Daerah	242.261.211
2.2	Belanja Pelayanan Publik	96.909.714
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan	12.669.507
2.4	Belanja Tidak Tersangka	304.000
	Surplus/Defisit	-846.407
III	Pembiayaan	846.407

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 (000Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	24.187.56
1.1	Pajak Daerah	2.596.994
1.2	Retribusi Daerah	15.927.477
1.3	Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.407.399
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.255.587
II	Dana Perimbangan	308.052.392
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	15.621.853
2.2	Dana Alokasi Umum	268.325.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	10.790.000
2.4	Dana Perimbangan dari Propinsi	13.315.539
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	19.058.178
	Jumlah Pendapatan Daerah	351.298.025

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Belanja Aparatur Daerah	242.261.211
1.1	Belanja Administrasi Umum	227.645.836
1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	10.487.211
1.3	Belanja Modal	4.128.164
II	Belanja Pelayanan Publik	96.909.714
2.1	Belanja Administrasi Umum	4.324.724
2.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	65.937.470
2.3	Belanja Modal	26.647.521
III	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan	12.669.507
IV	Belanja Tidak Tersangka	304.000
	Jumlah Belanja Daerah	352.144.433



LAMPIRAN 2
Realisasi Pendapatan dan Belanja Provinsi DIY Tahun 2006

Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2006 (000 Rp)

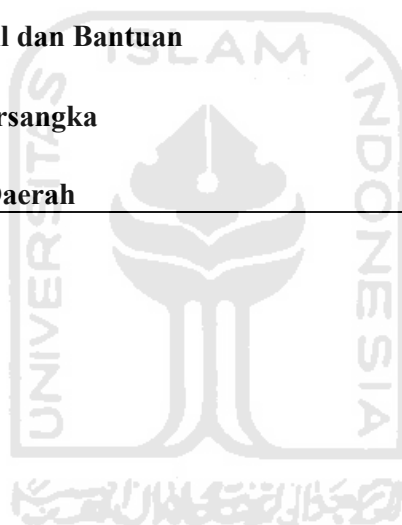
No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	519.022.237
1.1	Pendapatan Asli Daerah	96.419.456
1.2	Dana Perimbangan	397.150.854
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	25.451.927
II	Belanja Daerah	496.768.977
2.1	Belanja Aparatur Daerah	57.866.313
2.2	Belanja Pelayanan Publik	369.756.400
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan	59.411.518
2.4	Belanja Tidak Tersangka	9.734.746
	Surplus/Defisit	22.253.260
III	Pembiayaan	(22.253.260)

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2006 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	96.419.456
1.1	Pajak Daerah	43.997.150
1.2	Retribusi Daerah	24.704.781
1.3	Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.722.505
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19.995.020
II	Dana Perimbangan	397.150.854
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	40.145.141
2.2	Dana Alokasi Umum	316.832.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	4.800.000
2.4	Dana Perimbangan dari Propinsi	35.373.713
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	25.451.927
	Jumlah Pendapatan Daerah	519.022.237

Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2006 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Belanja Aparatur Daerah	57.866.313
1.1	Belanja Administrasi Umum	36.737.619
1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	17.833.889
1.3	Belanja Modal	3.249.805
II	Belanja Pelayanan Publik	369.756.400
2.1	Belanja Administrasi Umum	238.144.704
2.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	55.504.444
2.3	Belanja Modal	76.107.252
III	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan	59.411.518
IV	Belanja Tidak Tersangka	9.734.746
	Jumlah Belanja Daerah	496.768.977



Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2006 (000 Rp)

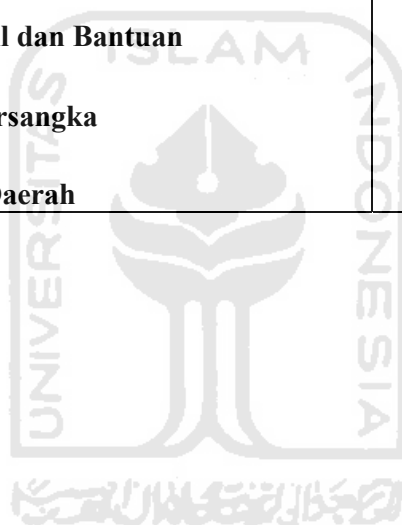
No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	702.929.581
1.1	Pendapatan Asli Daerah	90.710.095
1.2	Dana Perimbangan	612.219.486
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	-
II	Belanja Daerah	609.765.409
2.1	Belanja Aparatur Daerah	133.556.119
2.2	Belanja Pelayanan Publik	425.391.320
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan	47.069.553
2.4	Belanja Tidak Tersangka	3.748.417
	Surplus/Defisit	93.164.172
III	Pembiayaan	(93.164.172)

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2006 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	90.710.095
1.1	Pajak Daerah	37.979.313
1.2	Retribusi Daerah	34.867.832
1.3	Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.048.288
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.814.662
II	Dana Perimbangan	612.219.486
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	49.511.372
2.2	Dana Alokasi Umum	485.397.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	25.860.000
2.4	Dana Perimbangan dari Propinsi	51.451.114
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0
	Jumlah Pendapatan Daerah	702.929.581

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2006 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Belanja Aparatur Daerah	133.556.119
1.1	Belanja Administrasi Umum	92.567.442
1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	32.086.175
1.3	Belanja Modal	8.902.502
II	Belanja Pelayanan Publik	425.391.320
2.1	Belanja Administrasi Umum	308.806.281
2.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	45.064.968
2.3	Belanja Modal	71.520.071
III	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan	47.069.553
IV	Belanja Tidak Tersangka	3.748.417
	Jumlah Belanja Daerah	609.765.409



Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Tahun Bantul 2006 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	599.619.651
1.1	Pendapatan Asli Daerah	44.005.311
1.2	Dana Perimbangan	555.614.340
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0
II	Belanja Daerah	545.132.136
2.1	Belanja Aparatur Daerah	118.338.775
2.2	Belanja Pelayanan Publik	342.712.990
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan	43.404.030
2.4	Belanja Tidak Tersangka	40.676.341
	Surplus/Defisit	54.487.515
III	Pembiayaan	(54.487.515)

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tahun Bantul 2006 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	44.005.311
1.1	Pajak Daerah	9.836.299
1.2	Retribusi Daerah	22.412.840
1.3	Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.579.135
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.177.037
II	Dana Perimbangan	555.614.340
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	22.016.134
2.2	Dana Alokasi Umum	470.847.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	33.890.000
2.4	Dana Perimbangan dari Propinsi	28.861.206
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0
	Jumlah Pendapatan Daerah	599.619.651

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tahun Bantul 2006 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Belanja Aparatur Daerah	118.338.775
1.1	Belanja Administrasi Umum	97.376.949
1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	12.931.419
1.3	Belanja Modal	8.030.407
II	Belanja Pelayanan Publik	32.712.990
2.1	Belanja Administrasi Umum	248.232.384
2.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	36.908.236
2.3	Belanja Modal	57.572.370
III	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan	43.404.030
IV	Belanja Tidak Tersangka	40.676.341
	Jumlah Belanja Daerah	545.132.136



Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2006 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	448.371.803
1.1	Pendapatan Asli Daerah	35.203.275
1.2	Dana Perimbangan	411.311.701
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.856.827
II	Belanja Daerah	458.909.862
2.1	Belanja Aparatur Daerah	62.469.375
2.2	Belanja Pelayanan Publik	346.048.954
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan	48.934.105
2.4	Belanja Tidak Tersangka	1.457.428
	Surplus/Defisit	(10.538.059)
III	Pembiayaan	10.538.059

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2006 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	35.203.275
1.1	Pajak Daerah	3.320.982
1.2	Retribusi Daerah	20.018.580
1.3	Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.781.701
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.802.012
II	Dana Perimbangan	411.311.701
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	17.844.066
2.2	Dana Alokasi Umum	344.035.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	32.865.000
2.4	Dana Perimbangan dari Propinsi	16.567.635
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.856.827
	Jumlah Pendapatan Daerah	448.371.803

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2006 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Belanja Aparatur Daerah	62.469.375
1.1	Belanja Administrasi Umum	45.809.117
1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	13.165.680
1.3	Belanja Modal	3.494.578
II	Belanja Pelayanan Publik	346.048.954
2.1	Belanja Administrasi Umum	211.630.236
2.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	63.202.748
2.3	Belanja Modal	71.215.970
III	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan	48.934.105
IV	Belanja Tidak Tersangka	1.457.428
	Jumlah Belanja Daerah	458.909.862



Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 (000 Rp)

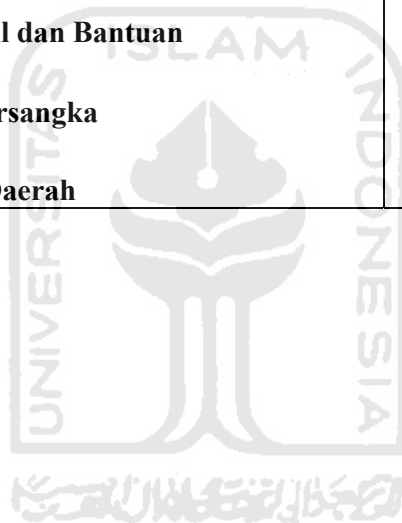
No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	52.352.228
1.1	Pendapatan Asli Daerah	29.801.036
1.2	Dana Perimbangan	496.521.378
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.029.814
II	Belanja Daerah	503.624.606
2.1	Belanja Aparatur Daerah	292.230.124
2.2	Belanja Pelayanan Publik	164.965.288
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan	41.678.099
2.4	Belanja Tidak Tersangka	4.751.095
	Surplus/Defisit	23.727.622
III	Pembiayaan	(23.727.622)

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	29.801.036
1.1	Pajak Daerah	3.389.990
1.2	Retribusi Daerah	18.327.422
1.3	Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.608.250
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.475.374
II	Dana Perimbangan	496.521.378
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	20.498.367
2.2	Dana Alokasi Umum	432.868.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	29.080.000
2.4	Dana Perimbangan dari Propinsi	14.075.011
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.029.814
	Jumlah Pendapatan Daerah	527.352.228

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Belanja Aparatur Daerah	292.230.124
1.1	Belanja Administrasi Umum	276.140.088
1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	11.671.200
1.3	Belanja Modal	4.418.836
II	Belanja Pelayanan Publik	164.965.288
2.1	Belanja Administrasi Umum	6.402.319
2.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	47.876.957
2.3	Belanja Modal	110.686.012
III	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan	41.678.099
IV	Belanja Tidak Tersangka	4.751.095
	Jumlah Belanja Daerah	503.624.606



LAMPIRAN 3
Realisasi Pendapatan dan Belanja Provinsi DIY Tahun 2007

Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2007 (000 Rp)

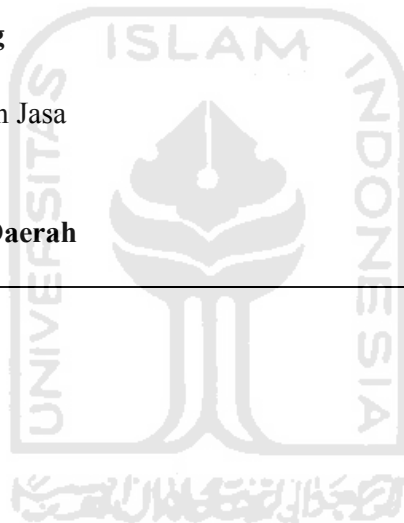
No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	615.648.852
1.1	Pendapatan Asli Daerah	114.098.351
1.2	Dana Perimbangan	439.159.224
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	62.391.277
II	Belanja Daerah	569.120.372
2.1	Belanja Tidak Langsung	324.993.963
2.2	Belanja Langsung	244.126.409
	Surplus/Defisit	46.528.480
III	Pembiayaan Netto	88.239.636

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2007 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	114.098.351
1.1	Pajak Daerah	54.783.203
1.2	Retribusi Daerah	29.197.466
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.783.239
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.334.443
II	Dana Perimbangan	439.159.224
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	47.329.224
2.2	Dana Alokasi Umum	365.042.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	26.788.000
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	62.391.277
	Jumlah Pendapatan Daerah	615.648.852

Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2007 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Belanja Tidak Langsung	324.993.963
1.1	Belanja Pegawai	263.728.387
1.2	Belanja Bunga	707.121
1.3	Belanja Subsidi	306.876
1.4	Belanja Hibah	-
1.5	Belanja Bantuan Sosial	57.696.628
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	-
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	-
1.8	Belanja Tidak Terduga	2.554.951
II	Belanja Langsung	244.126.409
2.1	Belanja Pegawai	68.476.753
2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.667.260
2.3	Belanja Modal	89.982.396
	Jumlah Belanja Daerah	569.120.372



Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2007 (000 Rp)

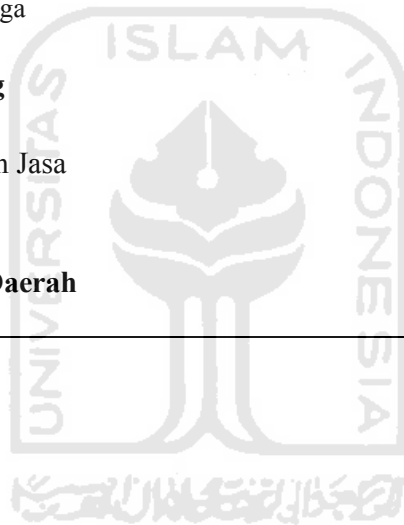
No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	825.004.186
1.1	Pendapatan Asli Daerah	120.656.549
1.2	Dana Perimbangan	621.561.288
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	82.786.349
II	Belanja Daerah	752.113.976
2.1	Belanja Tidak Langsung	481.142.671
2.2	Belanja Langsung	270.971.305
	Surplus/Defisit	72.890.210
III	Pembiayaan Netto	122.873.255

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2007 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	120.656.549
1.1	Pajak Daerah	50.287.666
1.2	Retribusi Daerah	40.965.628
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.732.298
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.670.957
II	Dana Perimbangan	621.561.288
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	68.345.288
2.2	Dana Alokasi Umum	543.065.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	10.151.000
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	82.786.349
	Jumlah Pendapatan Daerah	825.004.186

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2007 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Belanja Tidak Langsung	481.142.671
1.1	Belanja Pegawai	405.719.783
1.2	Belanja Bunga	136.591
1.3	Belanja Subsidi	7.743.887
1.4	Belanja Hibah	-
1.5	Belanja Bantuan Sosial	39.938.344
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	18.615.843
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	8.988.223
1.8	Belanja Tidak Terduga	-
II	Belanja Langsung	270.971.305
2.1	Belanja Pegawai	62.948.683
2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.462.428
2.3	Belanja Modal	109.560.194
	Jumlah Belanja Daerah	752.113.976



Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2007 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	727.836.912
1.1	Pendapatan Asli Daerah	57.229.727
1.2	Dana Perimbangan	602.942.019
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	67.664.166
II	Belanja Daerah	676.835.482
2.1	Belanja Tidak Langsung	451.495.662
2.2	Belanja Langsung	225.339.820
	Surplus/Defisit	51.001.430
III	Pembiayaan Netto	68.712.339

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2007 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	57.229.727
1.1	Pajak Daerah	10.191.536
1.2	Retribusi Daerah	30.808.409
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.014.646
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.215.136
II	Dana Perimbangan	602.943.019
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	30.941.019
2.2	Dana Alokasi Umum	524.293.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	47.709.000
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	67.664.166
	Jumlah Pendapatan Daerah	727.836.912

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2007 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Belanja Tidak Langsung	451.495.662
1.1	Belanja Pegawai	382.526.155
1.2	Belanja Bunga	106.418
1.3	Belanja Subsidi	-
1.4	Belanja Hibah	-
1.5	Belanja Bantuan Sosial	42.957.998
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	1.455.547
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	23.903.052
1.8	Belanja Tidak Terduga	546.492
II	Belanja Langsung	225.339.820
2.1	Belanja Pegawai	40.477.938
2.2	Belanja Barang dan Jasa	79.397.676
2.3	Belanja Modal	105.464.206
	Jumlah Belanja Daerah	676.835.482



Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2007 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	522.937.814
1.1	Pendapatan Asli Daerah	38.882.765
1.2	Dana Perimbangan	441.229.947
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	42.825.102
II	Belanja Daerah	492.840.107
2.1	Belanja Tidak Langsung	293.463.109
2.2	Belanja Langsung	199.376.998
	Surplus/Defisit	30.097.707
III	Pembiayaan Netto	25.294.276

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2007 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	38.882.765
1.1	Pajak Daerah	3.366.877
1.2	Retribusi Daerah	22.355.638
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.805.165
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.355.085
II	Dana Perimbangan	441.229.947
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	20.928.279
2.2	Dana Alokasi Umum	378.145.130
2.3	Dana Alokasi Khusus	42.156.538
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	42.825.102
	Jumlah Pendapatan Daerah	522.937.814

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2007 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Belanja Tidak Langsung	293.463.109
1.1	Belanja Pegawai	261.756.129
1.2	Belanja Bunga	95.258
1.3	Belanja Subsidi	170.000
1.4	Belanja Hibah	1.229.500
1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.573.783
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	690.463
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	21.730.978
1.8	Belanja Tidak Terduga	216.998
II	Belanja Langsung	199.376.998
2.1	Belanja Pegawai	31.044.707
2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.605.437
2.3	Belanja Modal	93.726.854
	Jumlah Belanja Daerah	492.840.107



Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 (000Rp)

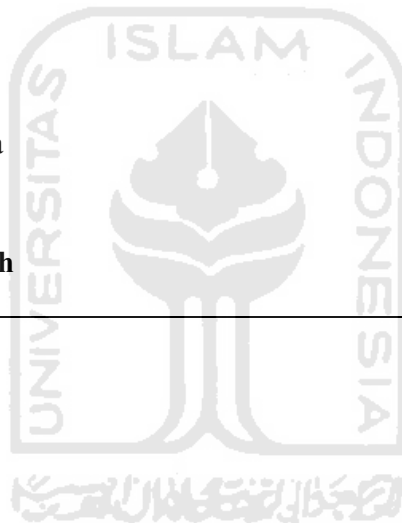
No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	602.645.623
1.1	Pendapatan Asli Daerah	28.878.356
1.2	Dana Perimbangan	532.642.917
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	41.124.350
II	Belanja Daerah	575.683.751
2.1	Belanja Tidak Langsung	342.857.477
2.2	Belanja Langsung	232.826.274
	Surplus/Defisit	26.961.872
III	Pembiayaan Netto	49.792.372

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	28.878.356
1.1	Pajak Daerah	5.105.382
1.2	Retribusi Daerah	15.093.480
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.401.288
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.278.206
II	Dana Perimbangan	532.642.917
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	23.624.917
2.2	Dana Alokasi Umum	459.851.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	49.167.000
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	41.124.350
	Jumlah Pendapatan Daerah	602.645.623

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Belanja Tidak Langsung	342.857.477
1.1	Belanja Pegawai	284.689.368
1.2	Belanja Bunga	76.391
1.3	Belanja Subsidi	-
1.4	Belanja Hibah	-
1.5	Belanja Bantuan Sosial	26.840.849
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	2.361.334
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	27.033.190
1.8	Belanja Tidak Terduga	1.856.345
II	Belanja Langsung	232.826.274
2.1	Belanja Pegawai	37.365.035
2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.892.075
2.3	Belanja Modal	117.569.164
	Jumlah Belanja Daerah	575.683.751



LAMPIRAN 4
Realisasi Pendapatan dan Belanja Provinsi DIY Tahun 2008

Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2008 (000 Rp)

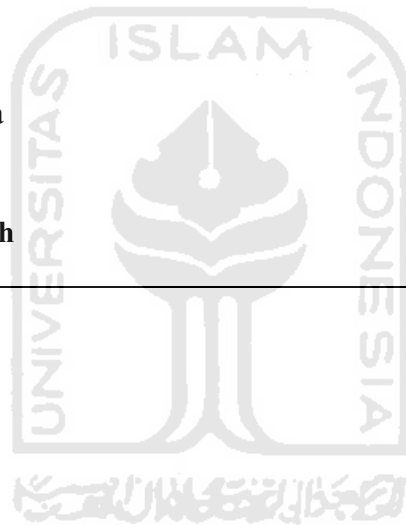
No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	720.252.933
1.1	Pendapatan Asli Daerah	132.431.572
1.2	Dana Perimbangan	504.741.155
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	83.080.206
II	Belanja Daerah	698.566.664
2.1	Belanja Tidak Langsung	415.300.349
2.2	Belanja Langsung	283.266.315
	Surplus/Defisit	21.686.269
III	Pembiayaan Netto	121.911.046

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2008 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	132.431.572
1.1	Pajak Daerah	62.452.771
1.2	Retribusi Daerah	34.940.602
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.454.824
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26.583.375
II	Dana Perimbangan	504.741.155
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	61.245.923
2.2	Dana Alokasi Umum	411.257.232
2.3	Dana Alokasi Khusus	32.238.000
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	83.080.206
	Jumlah Pendapatan Daerah	720.252.933

Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2008 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Belanja Tidak Langsung	415.300.349
1.1	Belanja Pegawai	342.891.947
1.2	Belanja Bunga	579.028
1.3	Belanja Subsidi	0
1.4	Belanja Hibah	22.180.861
1.5	Belanja Bantuan Sosial	49.587.685
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	0
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	0
1.8	Belanja Tidak Terduga	60.828
II	Belanja Langsung	283.266.315
2.1	Belanja Pegawai	85.279.523
2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.700.730
2.3	Belanja Modal	107.286.062
	Jumlah Belanja Daerah	698.566.664



Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2008 (000 Rp)

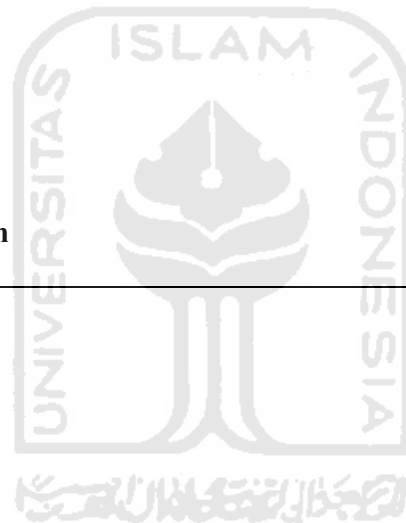
No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	946.476.028
1.1	Pendapatan Asli Daerah	140.631.359
1.2	Dana Perimbangan	688.941.479
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	116.903.190
II	Belanja Daerah	906.618.990
2.1	Belanja Tidak Langsung	599.135.141
2.2	Belanja Langsung	307.483.850
	Surplus/Defisit	39.857.038
III	Pembiayaan Netto	174.050.720

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2008 000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	140.631.359
1.1	Pajak Daerah	61.020.899
1.2	Retribusi Daerah	52.065.472
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.676.981
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.868.007
II	Dana Perimbangan	688.941.479
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	86.195.951
2.2	Dana Alokasi Umum	592.594.528
2.3	Dana Alokasi Khusus	10.151.000
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	116.903.190
	Jumlah Pendapatan Daerah	946.476.028

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2008 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Belanja Tidak Langsung	599.135.141
1.1	Belanja Pegawai	506.121.542
1.2	Belanja Bunga	120.031
1.3	Belanja Subsidi	10.042.471
1.4	Belanja Hibah	0
1.5	Belanja Bantuan Sosial	45.390.061
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	21.173.017
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	16.981.721
1.8	Belanja Tidak Terduga	306.297
II	Belanja Langsung	307.483.850
2.1	Belanja Pegawai	80.195.754
2.2	Belanja Barang dan Jasa	128.893.961
2.3	Belanja Modal	98.394.135
	Jumlah Belanja Daerah	906.618.990



Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2008 (000 Rp)

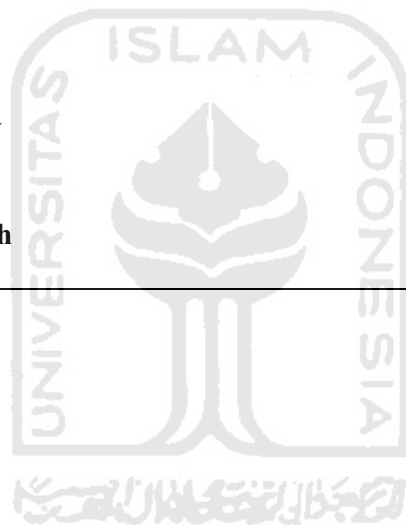
No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	1.023.590.208
1.1	Pendapatan Asli Daerah	69.800.762
1.2	Dana Perimbangan	679.250.090
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	274.539.356
II	Belanja Daerah	1.045.423.303
2.1	Belanja Tidak Langsung	598.167.227
2.2	Belanja Langsung	447.256.076
	Surplus/Defisit	(21.833.095)
III	Pembiayaan Netto	84.776.366

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2008 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	69.800.762
1.1	Pajak Daerah	12.070.899
1.2	Retribusi Daerah	37.171.639
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.449.915
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.108.309
II	Dana Perimbangan	679.250.090
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	38.632.739
2.2	Dana Alokasi Umum	583.169.351
2.3	Dana Alokasi Khusus	57.448.000
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	274.539.356
	Jumlah Pendapatan Daerah	1.023.590.208

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2008 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Belanja Tidak Langsung	598.167.227
1.1	Belanja Pegawai	468.562.524
1.2	Belanja Bunga	92.934
1.3	Belanja Subsidi	0
1.4	Belanja Hibah	11.190.000
1.5	Belanja Bantuan Sosial	65.973.535
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	1.822.217
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	47.104.875
1.8	Belanja Tidak Terduga	3.421.142
II	Belanja Langsung	447.256.076
2.1	Belanja Pegawai	42.306.375
2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.189.334
2.3	Belanja Modal	302.760.367
	Jumlah Belanja Daerah	1.045.423.303



Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2008 (000 Rp)

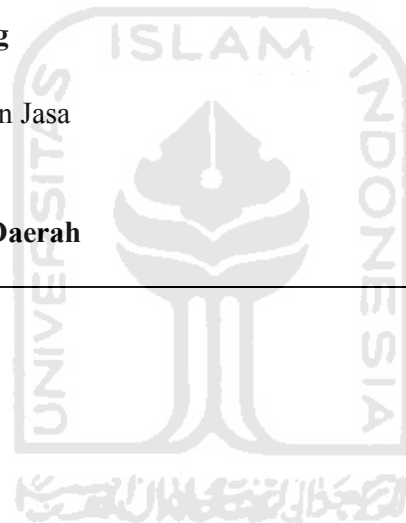
No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	581.934.155
1.1	Pendapatan Asli Daerah	42.286.238
1.2	Dana Perimbangan	478.584.756
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	61.063.161
II	Belanja Daerah	598.059.934
2.1	Belanja Tidak Langsung	382.928.580
2.2	Belanja Langsung	215.131.354
	Surplus/Defisit	(16.125.779)
III	Pembiayaan Netto	46.140.742

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2008 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	42.286.238
1.1	Pajak Daerah	3.709.446
1.2	Retribusi Daerah	26.706.083
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.608.710
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.261.999
II	Dana Perimbangan	478.584.756
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	22.789.973
2.2	Dana Alokasi Umum	403.656.783
2.3	Dana Alokasi Khusus	52.18.000
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	61.063.161
	Jumlah Pendapatan Daerah	581.934.155

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2008 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Belanja Tidak Langsung	382.928.580
1.1	Belanja Pegawai	326.127.918
1.2	Belanja Bunga	84.614
1.3	Belanja Subsidi	140.000
1.4	Belanja Hibah	15.765.485
1.5	Belanja Bantuan Sosial	12.998.619
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	1.207.824
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	25.613.627
1.8	Belanja Tidak Terduga	990.493
II	Belanja Langsung	215.131.354
2.1	Belanja Pegawai	38.783.531
2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.650.994
2.3	Belanja Modal	91.696.829
	Jumlah Belanja Daerah	598.059.934



Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 (000Rp)

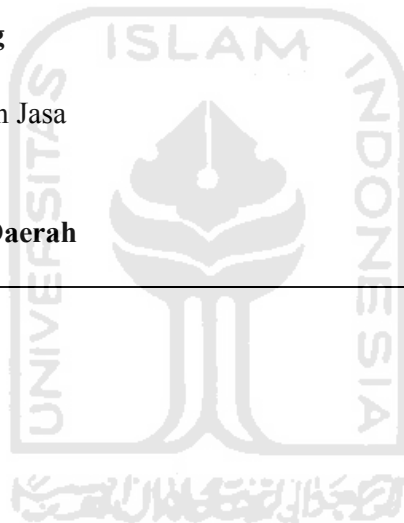
No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	688.258.857
1.1	Pendapatan Asli Daerah	32.907.615
1.2	Dana Perimbangan	591.432.826
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	63.918.415
II	Belanja Daerah	717.302.227
2.1	Belanja Tidak Langsung	449.265.098
2.2	Belanja Langsung	268.037.129
	Surplus/Defisit	(29.043.371)
III	Pembiayaan Netto	39.957.654

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	32.907.615
1.1	Pajak Daerah	5.489.806
1.2	Retribusi Daerah	17.270.848
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.709.221
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.437.739
II	Dana Perimbangan	591.432.826
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	26.158.078
2.2	Dana Alokasi Umum	504.395.748
2.3	Dana Alokasi Khusus	60.879.000
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	63.918.415
	Jumlah Pendapatan Daerah	688.258.857

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 (000Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Belanja Tidak Langsung	449.265.098
1.1	Belanja Pegawai	373.465.951
1.2	Belanja Bunga	68.324
1.3	Belanja Subsidi	0
1.4	Belanja Hibah	415.000
1.5	Belanja Bantuan Sosial	28.033.972
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	2.930.784
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	40.886.684
1.8	Belanja Tidak Terduga	3.464.384
II	Belanja Langsung	268.037.129
2.1	Belanja Pegawai	43.605.627
2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.655.164
2.3	Belanja Modal	137.776.338
	Jumlah Belanja Daerah	717.302.227



LAMPIRAN 5
Realisasi Pendapatan dan Belanja Provinsi DIY Tahun 2009

Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2009 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	751.100.000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	161.482.000
1.2	Dana Perimbangan	517.366.000
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	72.251.000
II	Belanja Daerah	1.016.025.604
2.1	Belanja Tidak Langsung	696.043.000
2.2	Belanja Langsung	86.735.000

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2009 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	161.482.000
1.1	Pajak Daerah	71.852.000
1.2	Retribusi Daerah	23.497.000
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.218.000
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.913.000
II	Dana Perimbangan	517.366.000
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	66.530.000
2.2	Dana Alokasi Umum	414.345.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	36.491.000
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	72.251.000
	Jumlah Pendapatan Daerah	751.100.000

Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2009 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Belanja Tidak Langsung	696.043.000
1.1	Belanja Pegawai	461.276.000
1.2	Belanja Bunga	142.079.000
1.4	Belanja Hibah	49.915.000
1.5	Belanja Subsidi	-
1.6	Belanja Bantuan Sosial	42.312.000
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-
1.8	Belanja Tidak Terduga	1.764.000
II	Belanja Langsung	86.735.000
2.1	Belanja Tanah	2.466.000
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	6.026.000
2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	39.078.000
2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.046.000
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-
2.6	Belanja Aset Lainnya	23.116.000
	Jumlah Belanja Daerah	1.016.025.604

Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2009 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	996.182.714.691
1.1	Pendapatan Asli Daerah	157.231.267.811
1.2	Dana Perimbangan	717.703.169.280
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	121.248.277.600
II	Belanja Daerah	1.016.025.604
2.1	Belanja Tidak Langsung	
2.2	Belanja Langsung	

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2009 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	157.231.267.811
1.1	Pajak Daerah	71.044.731.106
1.2	Retribusi Daerah	54.719.438.555
1.3	Bagian Laba Usaha Milik Daerah	9.973.164.266
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.493.933.882
II	Dana Perimbangan	717.703.169.280
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	93.869.391.280
2.2	Dana Alokasi Umum	587.857.778.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	35.976.000.000
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	121.248.277.600
	Jumlah Pendapatan Daerah	996.182.714.691

Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2009 (000 Rp)

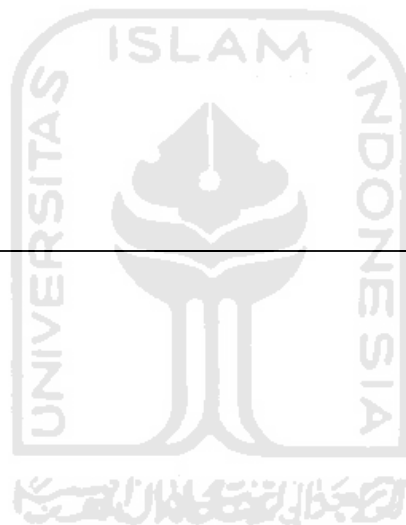
No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	882.149.788.429
1.1	Pendapatan Asli Daerah	88.691.362.690
1.2	Dana Perimbangan	668.488.989.539
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	124.969.436.200
II	Belanja Daerah	903.767.000.429
2.1	Belanja Tidak Langsung	634.893.132.281
2.2	Belanja Langsung	268.873.868.148

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2009 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	88.691.362.690
1.1	Pajak Daerah	14.108.451.478
1.2	Retribusi Daerah	58.205.951.445
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.512.838.194
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.864.121.571
II	Dana Perimbangan	668.488.989.539
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	44.351.846.539
2.2	Dana Alokasi Umum	568.502.143.000
2.2	Dana Alokasi Khusus	55.635.000.000
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	124.969.436.200
	Jumlah Pendapatan Daerah	882.149.788.429

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2009 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Belanja Tidak Langsung	634.893.132.281
1.1	Belanja Pegawai	581.029.497.999
1.2	Belanja Bunga	78.962.221
1.4	Belanja Hibah	29.718.902.000
1.5	Belanja Bantuan Sosial	57.854.122.121
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	3.692.829.300
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	24.816.860.000
1.8	Belanja Tidak Terduga	431.958.640
II	Belanja Langsung	268.873.868.148
2.1	Belanja Pegawai	42.800.698.491
2.2	Belanja Barang dan Jasa	118.719.979.086
2.3	Belanja Modal	107.353.190.571
	Jumlah Belanja Daerah	903.767.000.429



Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2009 (000 Rp)

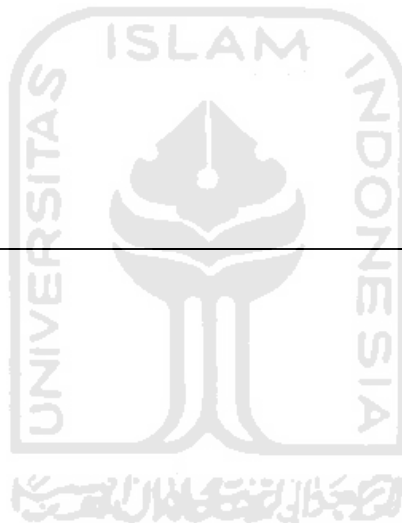
No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	596.428.928.201
1.1	Pendapatan Asli Daerah	39.358.629.412
1.2	Dana Perimbangan	494.268.843.933
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	62.801.454.856
II	Belanja Daerah	577.736.996.100
2.1	Belanja Tidak Langsung	444.766.627.124
2.2	Belanja Langsung	132.970.368.976

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2009 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	39.358.629.412
1.1	Pajak Daerah	3.549.894.568
1.2	Retribusi Daerah	5.918.692.238
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.208.953.134
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.681.089.470
II	Dana Perimbangan	494.268.843.933
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	24.788.201.933
2.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	413.081.642.000
2.2	Dana Alokasi Umum	56.399.000.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	62.801.454.856
	Jumlah Pendapatan Daerah	596.428.928.201

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2009 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Belanja Tidak Langsung	444.766.627.124
1.1	Belanja Pegawai	373.009.926.556
1.2	Belanja Bunga	73.480.857
1.4	Belanja Hibah	122.260.000
1.5	Belanja Bantuan Sosial	41.711.851.796
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	1.178.075.077
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	21.252.930.000
1.8	Belanja Tidak Terduga	412.077.000
II	Belanja Langsung	132.970.368.976
2.1	Belanja Pegawai	29.155.721.815
2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.004.170.636
2.3	Belanja Modal	40.810.476.525
	Jumlah Belanja Daerah	577.736.996.100



Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009
(000Rp)

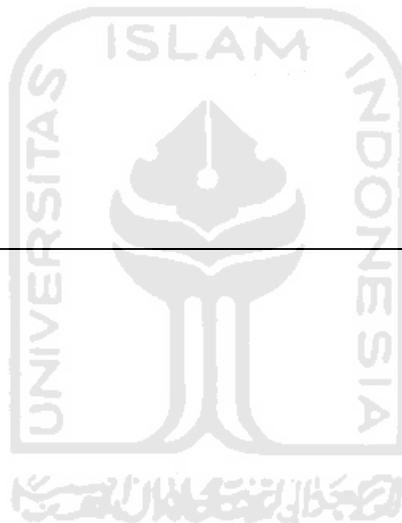
No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Daerah	712.116.631.894
1.1	Pendapatan Asli Daerah	38.613.310.072
1.2	Dana Perimbangan	609.368.036.722
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	64.135.285.100
II	Belanja Daerah	694.407.908.861
2.1	Belanja Tidak Langsung	500.209.102.642
2.2	Belanja Langsung	194.198.806.219

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 (000 Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Pendapatan Asli Daerah	38.613.310.072
1.1	Pajak Daerah	6.875.766.083
1.2	Retribusi Daerah	21.690.642.795
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.200.730.811
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.846.170.383
II	Dana Perimbangan	609.368.036.722
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	28.862.596.505
2.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	764.932.117
2.2	Dana Alokasi Umum	508.217.508.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	71.523.000.000
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	64.135.285.100
	Jumlah Pendapatan Daerah	712.116.631.894

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 (000Rp)

No	Rincian	Realisasi
I	Belanja Tidak Langsung	500.209.102.642
1.1	Belanja Pegawai	430.925.237.476
1.2	Belanja Bunga	59.872.452
1.4	Belanja Hibah	1.382.413.750
1.5	Belanja Bantuan Sosial	24.837.255.100
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	2.975.452.014
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Daerah	38.901.246.250
1.8	Belanja Tidak Terduga	1.127.625.600
II	Belanja Langsung	194.198.806.219
2.1	Belanja Pegawai	31.387.973.075
2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.967.278.443
2.3	Belanja Modal	93.843.554.701
	Jumlah Belanja Daerah	694.407.908.861



LAMPIRAN 6

PDRB Perkapita Provinsi DIY Tahun 2005-2009

Perkembangan PDRB Perkapita Kota Yogyakarta 2005-2009

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
PDRB Adh. Berlaku (Juta Rp)	6.744.102	7.732.639	8.599.468	9.806.813	10.591.621
PDRB Adh, Konstan (Juta Rp)	4.397.849	4.572.504	4.776.401	5.021.149	5.244.851
Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	435.236	443.112	451.118	456.915	462.663
PDRB Perkapita Adh. Konstan 2000 (Rp)	10.104.516	10.319.070	10.587.919	10.989.241	11.336.224
PDRB perkapita Adh. Berlaku (Rp)	15.495.276	17.450.756	19.062.569	21.463.101	22.891.956

Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Sleman 2005-2009

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
PDRB Adh. Berlaku (Juta Rp)	7.669.100	8.898.867	9.972.193	11.446.071	12.503.760
PDRB Adh, Konstan (Juta Rp)	5.080.564	5.309.059	5.553.380	5.838.246	6.099.557
Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	999.586	1.013.178	1.026.767	1.040.220	1.053.566
PDRB Perkapita Adh. Berlaku (Rp)	7.672.277	8.783.123	9.712.226	11.003.510	11.868.036
PDRB perkapita Adh. Konstan 2000 (Rp)	5.082.668	5.240.006	5.408.803	5.612.511	5.789.440

Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Bantul 2005-2009

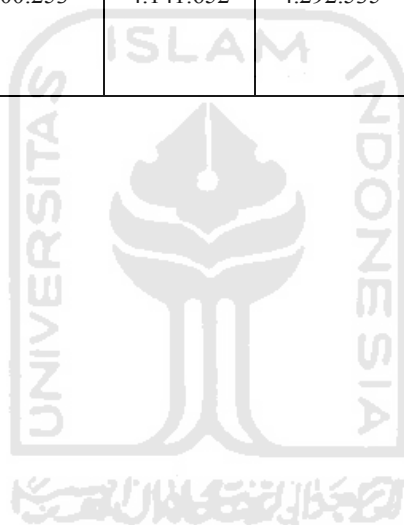
Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
PDRB Adh. Berlaku (Juta Rp)	4.903.668	5.722.466	6.409.648	7.417.980	8.147.860
PDRB Adh, Konstan (Juta Rp)	3.234.173	3.299.646	3.448.949	3.618.060	3.779.948
Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	871.203	884.086	896.994	909.812	922.566
PDRB Perkapita Adh. Berlaku (Rp)	5.628.617	6.472.748	7.145.697	8.153.311	8.831.737
PDRB perkapita Adh. Konstan 2000 (Rp)	3.712.307	3.732.268	3.845.008	3.976.712	4.097.212

Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Kulon Progo 2005-2009

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
PDRB Adh. Berlaku (Juta Rp)	2.074.363	2.414.960	2.672.861	3.038.165	2.286.278
PDRB Adh, Konstan (Juta Rp)	1.465.477	1.524.848	1.587.630	1.662.370	1.728.304
Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	373.770	374.142	374.445	374.783	374.921
PDRB Perkapita Adh. Berlaku (Rp)	5.549.837	6.454.661	7.138.195	8.106.465	8.765.255
PDRB perkapita Adh. Konstan 2000 (Rp)	3.920.799	4.075.587	4.239.954	4.435.553	4.609.781

Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Gunungkidul 2005-2009

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
PDRB Adh. Berlaku (Juta Rp)	3.855.092	4.412.844	4.872.123	5.502.208	5.987.782
PDRB Adh, Konstan (Juta Rp)	2.726.389	2.830.583	2.941.288	3.070.298	3.199.315
Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	681.554	683.443	685.210	686.772	688.153
PDRB Perkapita Adh. Berlaku (Rp)	5.656.326	6.456.784	7.110.408	8.011.695	8.701.236
PDRB perkapita Adh. Konstan 2000 (Rp)	4.000.253	4.141.652	4.292.535	4.470.621	4.649.134



LAMPIRAN 7

Data Hasil Pengujian

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PKt (t-1), DAU (t-1), PAD (t-1)	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Belanja Daerah (t)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.882 ^a	.779	.737	91818867.2	1.868

a. Predictors: (Constant), PKt (t-1), DAU (t-1), PAD (t-1)

b. Dependent Variable: Belanja Daerah (t)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5E+017	3	1.792E+017	20.592	.000 ^a
	Residual	1E+017	16	8.702E+015		
	Total	7E+017	19			

a. Predictors: (Constant), PKt (t-1), DAU (t-1), PAD (t-1)

b. Dependent Variable: Belanja Daerah (t)

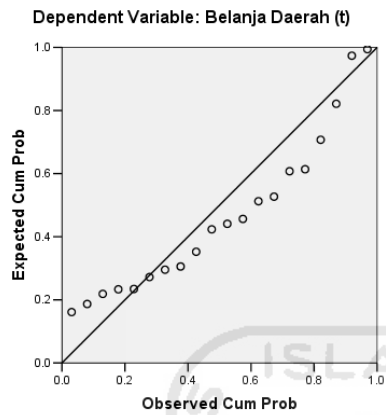
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7E+007	1E+008		.508	.618		
	PAD (t-1)	1.589	1.041	.338	1.527	.146	.262	3.819
	DAU (t-1)	1.195	.278	.720	4.293	.001	.457	2.187
	PKt (t-1)	5.755	16.088	.078	.358	.725	.267	3.739

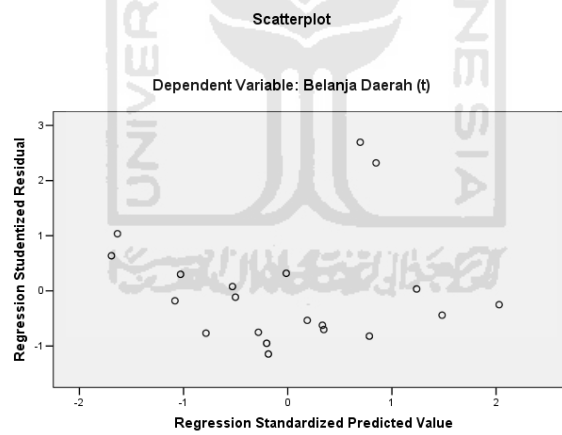
a. Dependent Variable: Belanja Daerah (t)

Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Uji Heterokedasitas



Uji Linieritas

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.060 ^a	.004	-.183	.99817923

a. Predictors: (Constant), PKT², DAU², PAD²

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD (t-1) ^b	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Belanja Daerah (t)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.614 ^a	.377	.342	153038767

a. Predictors: (Constant), PAD (t-1)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3E+017	1	2.552E+017	10.896	.004 ^a
	Residual	4E+017	18	2.342E+016		
	Total	7E+017	19			

a. Predictors: (Constant), PAD (t-1)

b. Dependent Variable: Belanja Daerah (t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5E+008	7E+007		7.584	.000
	PAD (t-1)	2.884	.874	.614	3.301	.004

a. Dependent Variable: Belanja Daerah (t)

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU (t-1) ^b	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Belanja Daerah (t)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.803 ^a	.644	.624	115675234

a. Predictors: (Constant), DAU (t-1)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4E+017	1	4.359E+017	32.577	.000 ^a
	Residual	2E+017	18	1.338E+016		
	Total	7E+017	19			

a. Predictors: (Constant), DAU (t-1)

b. Dependent Variable: Belanja Daerah (t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2E+008	1E+008		1.528	.144
	DAU (t-1)	1.332	.233	.803	5.708	.000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah (t)

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PKt (t-1) ^b	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Belanja Daerah (t)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.112 ^a	.013	-.042	192674316

a. Predictors: (Constant), PKt (t-1)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9E+015	1	8.539E+015	.230	.637 ^a
	Residual	7E+017	18	3.712E+016		
	Total	7E+017	19			

a. Predictors: (Constant), PKt (t-1)

b. Dependent Variable: Belanja Daerah (t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6E+008	1E+008		6.123	.000
	PKt (t-1)	8.242	17.185	.112	.480	.637

a. Dependent Variable: Belanja Daerah (t)